



LAPORAN K/NERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

**TAHUN
2025**



TIM PENYUSUN

Pengarah:

A. Koswara

Penyusun:

Miftahul Huda

R. Tomi Supratomo

Milka Primatianti

Chairiyanti

Luh Putu Ayu Damayanti

Punto Apri Sembodo

Tasya Annisa Putri

Elvanri Anggi Widianti

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sitasi:

Huda, M., R. T. Supratomo, M. Primatianti, Chairiyanti, L. P. A. Damayanti, P. A. Sembodo, T. A. Putri, E. A. Wdianti. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PK Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas DJPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memuat gambaran dan informasi mengenai berbagai upaya serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan DJPK untuk meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya. Selain itu, laporan ini juga mendukung pencapaian tiga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) pembersihan sampah plastik di laut.

DJPK berkomitmen untuk menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPK juga terus berupaya memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya melalui upaya konservasi, sekaligus menyediakan ekosistem yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan DJPK serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Pengelolaan Kelautan di masa depan.

Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026



A. Koswara

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis DJPK, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Target
2025 **9 IKU**

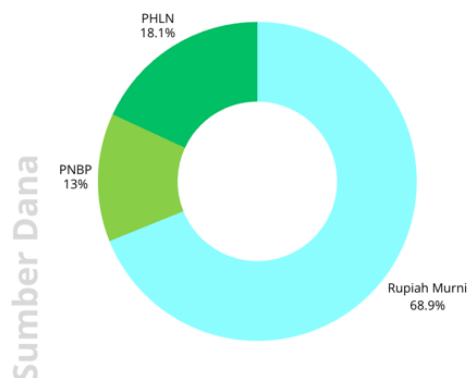
1 target triwulanan dan 8 target tahunan.

Nilai
Capaian
Organisasi **105,04**
Predikat Baik

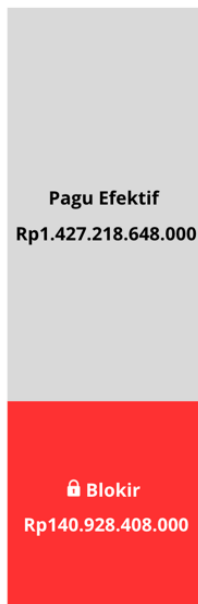
Kinerja DJPK terdiri atas 9 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2025 adalah sebesar **105,04% (baik)**. Dari 9 indikator kinerja tersebut, 8 indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target namun, terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni indikator kinerja produktivitas lahan garam rakyat dengan capaian 52,13 ton/ha atau 62,81%.



Anggaran DJPK 2025 Rp1.568.147.056.000



Rupiah Murni (Rp1.080.277.567.000),
PNBP (Rp204.125.489.000), PHLN (Rp 283.744.000.000)



Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Tahun 2025 sebesar Rp1.568.147.056.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp1.080.277.567.000), PNB (Rp204.125.489.000), serta PHLN (Rp283.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 1 (satu) Satker Pusat dan 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Realisasi anggaran DJPK Tahun 2025 adalah Rp1.308.005.113.377 dari total pagu Rp1.427.218.648.000 dengan persentase 91,66%. Adapun secara detail realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nama Program	Nomor	Pagu	Realisasi	%
1	Lingkungan hidup	1	355.648.398.000	196.638.324.516	55,29
		2	2.785.830.000	903.363.182	32,43
			358.434.228.000	197.541.687.698	55,11
2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1	888.416.617.000	826.707.564.367	93,05
		2	28.133.883.000	18.799.580.994	66,82
		3	117.092.817.000	92.541.474.417	79,03
			1.033.643.317.000	938.048.619.778	90,75
3	Dukungan Manajemen	1	176.069.511.000	166.261.612.556	94,43
Total			1.568.147.056.000	1.301.851.920.032	83,02

Pada Tahun 2025 terdapat 6 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal DJPK sebesar Rp573.248.391.000 dengan Rincian Rupiah Murni sebesar Rp216.064.899.000, Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp283.744.000.000, PNPB sebesar Rp73.439.492.000. Adapun secara detail proses revisi pagu anggaran DJPK dapat dilihat pada tabel berikut.

Revisi ke-	Keterangan Revisi	Pagu Semula (Rp.000)	Pagu Menjadi/Efektif (Rp.000)
1	Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025	586.807.674	400.320.763
2	Pergeseran Anggaran ke Ditjen PRL	586.807.674	396.661.480
3	Pembukaan Blokir Anggaran PNPB	583.148.391	424.066.658
4	Penambahan ABT Garam	1.426.623.457	1.267.541.724
5	Penambahan Anggaran PNPB	1.580.114.349	1.403.485.344
6	Relaksasi dan Program Belanja Pegawai	1.568.147.056	1.427.218.648

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target program; (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran pasca perkembangan organisasi dalam proses penyusunan dan penyempurnaan; dan (3) Perubahan struktur organisasi yang diikuti dengan penetapan kinerja baru menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Isu Strategis (Strategic Issues)	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029	20
2.2 Visi	21
2.3 Misi.....	21
2.4 Tujuan	22
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029.....	23
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2025	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup.....	29
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	29
3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	34
3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih.....	40
3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	48
3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	56
3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.....	56
3.2.2 SP 2.2 : Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	63
3.2.3 SP 2.3 : Meningkatnya Kualitas Produksi Garam.....	66
3.2.4 SP 2.4 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	69

3.3	Program 3 : Dukungan Manajemen	72
3.3.1	SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	72
3.4	Akuntabilitas Keuangan	75
BAB IV PENUTUP		77
4.1	Kesimpulan	77
4.2	Rekomendasi	78
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025	79
LAMPIRAN		81



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategi (SS) 1 dan 2 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029	23
Tabel 2.	Sasaran Program DJPK Tahun 2025-2029	24
Tabel 3.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025	26
Tabel 4.	Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK	28
Tabel 5.	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	31
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	31
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	36
Tabel 9.	Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	41
Tabel 10.	Bentuk Dukungan Para Pihak Pemangku Kepentingan	46
Tabel 11.	Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	49
Tabel 12.	Perbedaan Formula Penghitungan IKU	52
Tabel 13.	Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola	57
Tabel 14.	Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	57
Tabel 15.	Hasil Penghitungan Data Terhadap Lima Aspek di Gili Kondo NTB	58
Tabel 16.	Hasil Penghitungan Data Terhadap Lima Aspek di Pulau Rote	59
Tabel 17.	Hasil Penghitungan Data Terhadap Lima Aspek di Kamal Muara	60
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha) ..	64
Tabel 19.	Capaian Produktivitas Lahan Garam Rakyat di tiap Provinsi	64
Tabel 20.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	67
Tabel 21.	Capaian Produksi Garam Kualitas Satu (K1) di tiap Provinsi	67
Tabel 22.	Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	70
Tabel 23.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi	



lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai).....	73
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 lingkup KKP	74
Tabel 25. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan.....	75
Tabel 26. Revisi pagu anggaran DJPK	75
Tabel 27. Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025.....	77
Tabel 28. Revisi Pagu Anggaran DJPK.....	78
Tabel 29. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025	79
Tabel 30. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK	4
Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	13
Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK	14
Gambar 4. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025	28
Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	30
Gambar 6. Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali.....	43
Gambar 7. Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar.....	44
Gambar 8. Foto Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pulau Gili Trawangan	45
Gambar 9. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Rote Ndao	50
Gambar 10. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Alor	51
Gambar 11. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Maluku Tenggara	51
Gambar 12. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Raja Ampat	51
Gambar 13. Rehabilitasi Mangrove di Kamal Muara, Jakarta Utara.....	52
Gambar 14. <i>Spider Web</i> Perhitungan 5 Aspek Pengukuran di Gili Kondo	58
Gambar 15. <i>Spider Web</i> Perhitungan 5 Aspek Pengukuran di Pulau Rote.....	60
Gambar 16. <i>Spider Web</i> Perhitungan 5 Aspek Pengukuran di Kamal Muara	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Pengesahan Juni 2025).....	82
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Pengesahan Desember 2025).....	85
Lampiran 3.	Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Tahun 2025	88
Lampiran 4.	Jenis Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola pada tahun 2025	95
Lampiran 5.	Tabel Hasil Kegiatan Aksi Bersih Pantai Laut	112
Lampiran 6.	Tabel Hasil Rehabilitasi Mangrove dan Sekolah Pantai Indonesia	113
Lampiran 7.	Tabel produktivitas lahan garam rakyat per Provinsi	114
Lampiran 8.	Tabel Kualitas Garam K1 Tahun 2025	117
Lampiran 9.	Tabel Nilai Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	120



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, yang terkait dengan penggunaan anggaran secara terukur dalam hal kuantitas dan kualitas. Sementara itu, Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pengelolaan kinerja meliputi: penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Proses pengusulan penataan organisasi DJPKRL dimulai sejak bulan September 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang disahkan pada tanggal 21 Oktober 2024 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi kementerian negara mampu memenuhi penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah, dan kebutuhan transformasi digital, sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan organisasi kementerian negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disahkan pada tanggal 8 November 2024 ditetapkan susunan organisasi KKP yang terdiri atas 10 Eselon 1 termasuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK). Lebih lanjut, tugas dan fungsi DJPK diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan (DJPK) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPK, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 18 Tahun 2025 pada tanggal 27 Mei 2025.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023, mulai dari level II hingga level 0, yang mencakup: Laporan Kinerja Interim (setiap triwulan); Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja DJPK Tahun 2025 ini memuat informasi yang komprehensif

mengenai capaian kinerja organisasi dari bulan Juli hingga bulan September 2025. Laporan ini mencakup: Capaian indikator kinerja; Perbandingan target dan realisasi Analisis keberhasilan; Kendala yang dihadapi; Solusi atas permasalahan; Efisiensi dalam pelaksanaan; Kegiatan pendukung; dan Rencana tindak lanjut untuk masing-masing indikator kinerja DJPK pada tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kelautan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPK Tahun 2025 adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program serta kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan hingga bulan September 2025.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;



5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
2. Direktorat Konservasi Ekosistem;
3. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Direktorat Jasa Bahari;
5. Direktorat Sumber Daya Kelautan;
6. Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, meliputi:

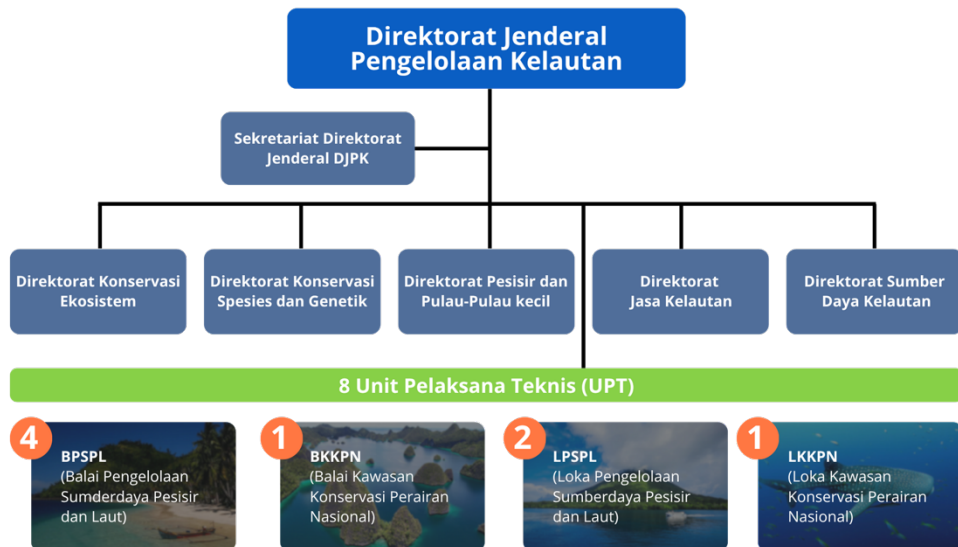
1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPK yang terdiri dari 2 UPT Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan 6 UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;
4. Balai PSPL Pontianak;
5. Balai PSPL Makassar;
6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan
8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan disajikan pada **Gambar 1** dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi DJPK

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan

- kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan; dan
 10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Konservasi Ekosistem

Direktorat Konservasi Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi ekosistem. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi,



penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan kawasan konservasi, pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistemnya serta areal preservasi, pengelolaan ekosistem biota perairan terancam punah, penyusunan daya dukung dan daya tampung pemanfaatan kawasan konservasi, pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi, penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi dan ekosistemnya, pembiayaan konservasi ekosistem berkelanjutan, pengembangan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi dan areal preservasi, penyusunan neraca sumber daya laut, perlindungan, pelestarian, pengelolaan karbon biru dan ekosistem terumbu karang, pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi, dan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem.

Direktorat Konservasi Ekosistem terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan konservasi spesies dan genetik. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan



kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;

5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusulan penetapan status perlindungan spesies terancam punah, perlindungan dan pelestarian spesies dan genetik biota perairan rawan dan terancam punah, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, otoritas pengelola CITES, pengelolaan kegiatan pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, pengendalian pemanfaatan spesies terancam punah dari habitat alam, pengelolaan ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan terancam punah, pengelolaan jenis ikan yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi dan appendiks CITES, penanganan biota perairan terdampar dan konflik biota perairan dilindungi, pengelolaan jenis asing invasif, pengelolaan migrasi biota perairan dilindungi, pemberdayaan masyarakat konservasi spesies dan genetik, penatalaksanaan konvensi internasional konservasi spesies dan genetik, dan perizinan pemanfaatan spesies dan genetik;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik.

Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan

terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lahan pulau-pulau kecil dan terluar, pembangunan prasarana dan sarana, rehabilitasi, dan restorasi pesisir dan pulau-pulau kecil, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Jasa Bahari

Direktorat Jasa Bahari mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan jasa bahari. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Bahari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan

bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, perdagangan karbon sektor kelautan, pengendalian pemanfaatan jasa bahari, penyediaan prasarana dan sarana jasa bahari, dan perizinan jasa bahari;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Bahari.

Direktorat Jasa Bahari terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Direktorat Sumber Daya Kelautan

Direktorat Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam,

pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan produksi garam nasional, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, pengelolaan hasil sedimentasi di laut, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, pemanfaatan air laut selain energi, pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, penyediaan prasarana dan sarana sumber daya kelautan, dan perizinan sumber daya kelautan;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Sumber Daya Kelautan.

Direktorat Sumber Daya Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

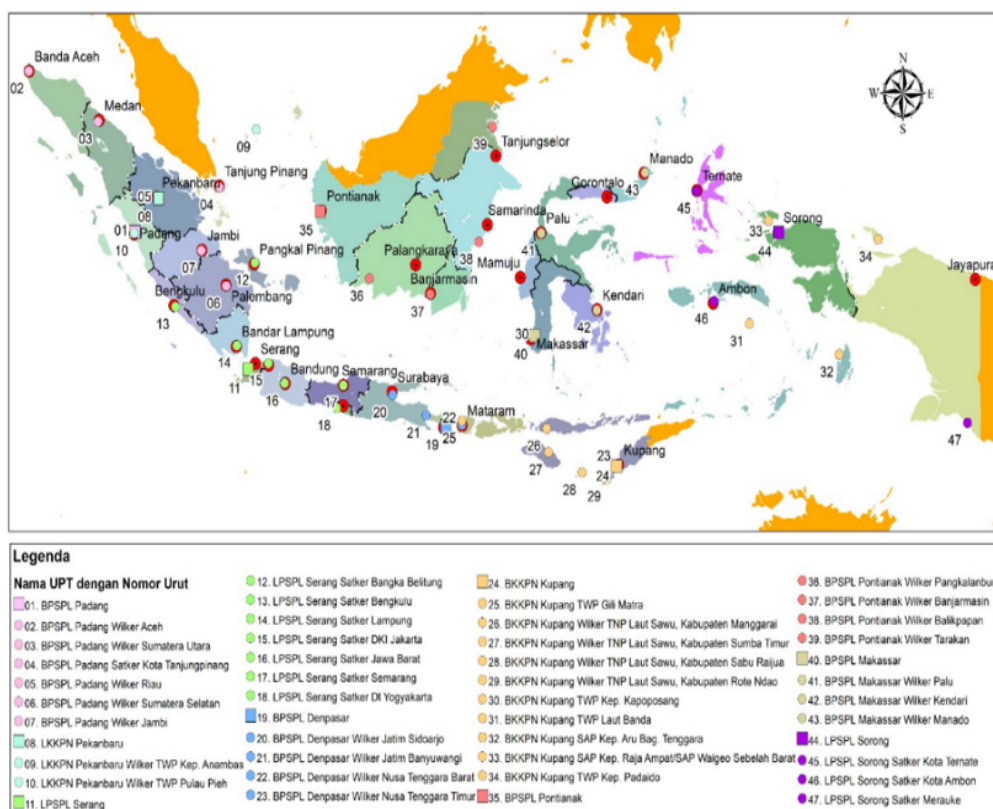
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai PSPL Padang
- b) Balai PSPL Pontianak
- c) Balai PSPL Makassar
- d) Balai PSPL Denpasar
- e) Loka PSPL Serang
- f) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPK disajikan pada **Gambar 2** berikut



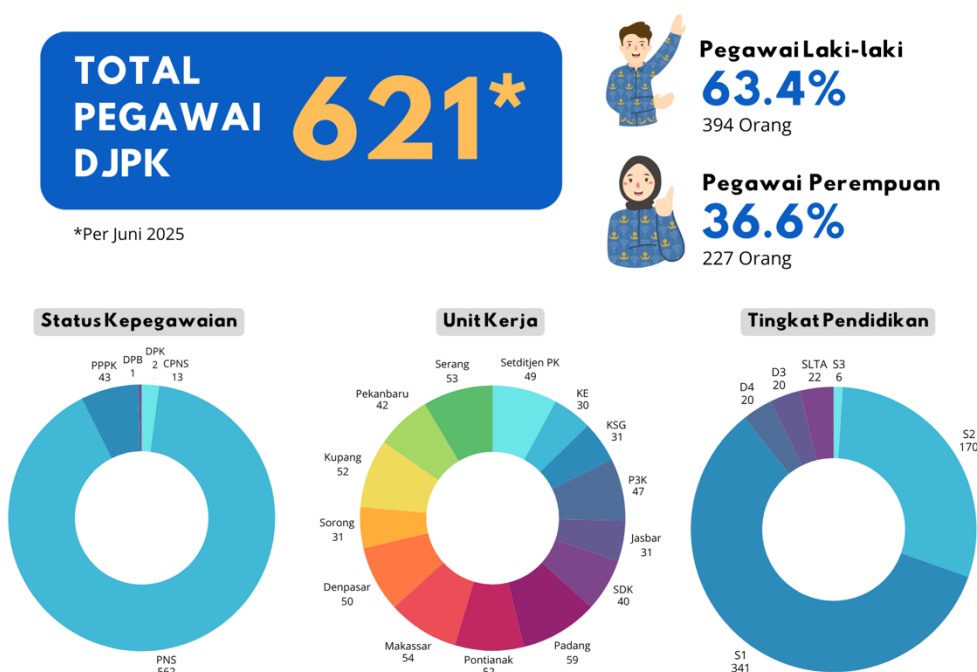
Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

H. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Sampai dengan Juni 2025, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan didukung oleh 621 orang pegawai, yang terdiri dari 394 orang pegawai laki – laki dan 227 orang pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, ASN DJPK didominasi oleh ASN sebanyak 562 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 43 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 13 orang, Dipekerjakan pada instansi lain (DPK) sebanyak 2 orang, dan Diperbantukan dari instansi lain (DPB) sebanyak 1 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPK paling banyak adalah strata 1 yaitu sebanyak 341 orang (58.9%), jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 170 orang, SMA sederajat sebanyak 22 orang, DIII sebanyak 20 orang, serta jenjang DIV sebanyak 20 orang dan strata 3 sebanyak 6 orang. Berdasarkan unit kerja, persebaran pegawai DJPK berada di

Setditjen PK sebanyak 49 orang, Direktorat Konservasi Ekosistem sebanyak 30 orang, Direktorat Konsevasi Spesies dan Genetik sebanyak 31 orang, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 47 orang, Direktorat Jasa Bahari sebanyak 31 orang, Direktorat Sumber Daya Kelautan sebanyak 40 orang, BPSPL Padang sebanyak 59 orang, BPSPL Pontianak sebanyak 52 orang, BPSPL Makassar sebanyak 54 orang, BPSPL Denpasar sebanyak 50 orang, LPSPL Sorong sebanyak 31 orang, BKKPN Kupang sebanyak 52 orang, LKKPN Pekanbaru sebanyak 42 orang, dan LPSPL Serang sebanyak 53 orang. Adapun keragaman pegawai DJPK tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam infografis pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPK

1.4 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Isu yang menjadi fokus strategis pemerintah Indonesia untuk menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pembangunan nasional yang sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia saling terkait satu dengan lainnya. Isu strategis tersebut meliputi kedaulatan maritim, keamanan laut, ekonomi kelautan, konservasi, pelestarian lingkungan laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, pemberdayaan masyarakat pesisir, inovasi kelautan, kerjasama internasional dan kebijakan serta regulasi.

Potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah perairan seluas 8,3 juta kilometer persegi dan garis pantai dengan panjang 108.000 kilometer serta 17.504 pulau sangat melimpah (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018; Badan Informasi Geospasial, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan status mega biodiversitas yang memiliki sekitar 8.500 spesies biota laut. Perairan Indonesia menjadi habitat bagi 16% spesies ikan laut, 39% spesies mamalia laut, dan 56% spesies reptil dunia. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang berada di sepanjang garis khatulistiwa. Posisi tersebut menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan suhu perairan yang hangat dan stabil, kondisi yang ideal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan berbagai jenis biota laut.

Selain menjadi habitat bagi ikan, mamalia, dan reptil laut, Indonesia juga merupakan rumah bagi sebagian besar ekosistem terumbu karang dunia. Perairan Indonesia termasuk dalam wilayah segitiga terumbu karang dunia (*Coral Triangle Area*), yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global. Kawasan ini menampung sekitar 76% spesies karang dunia dan 34% dari total luas tutupan terumbu karang dunia. Luas ekosistem terumbu karang Indonesia mencapai 2,53 juta ha, atau sekitar 10% dari total luas tutupan terumbu karang dunia yang mencapai 28,43 juta ha. (Spalding dkk., 2001; Burke dkk., 2014; COREMAP-CTI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016).

Selain terumbu karang, Indonesia memiliki ekosistem pesisir lainnya yang sangat penting, yaitu hutan *mangrove* dan padang lamun. Indonesia memiliki hutan *mangrove* dan lamun yang luas. Luas ekosistem *mangrove* Indonesia mencapai 3,49 juta ha atau setara dengan 21% dari total luasan *mangrove* dunia sebesar 16,53 juta ha. Sementara itu, luas padang lamun di Indonesia diperkirakan mencapai 3 juta ha atau sekitar 15% dari total luas lamun dunia (KKP, 2025).

Secara alur lintas laut, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia). Kondisi ini memperkuat peran Indonesia sebagai penghubung utama jalur perdagangan internasional, terutama melalui Selat Malaka. Selain itu, keberadaan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Melalui ALKI, Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan regional di Asia-Pasifik dan kawasan ASEAN secara maksimal, mendukung pertumbuhan sektor logistik dan transportasi laut.

Potensi energi laut Indonesia mencapai 288 GW, termasuk pasang surut, gelombang, dan angin lepas pantai. Selat Riau, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan lokasi potensial untuk ekstraksi energi pasang surut (Firdaus *et al.*, 2017). Energi gelombang laut juga dapat menjadi sumber daya baru untuk diversifikasi energi nasional. Potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) merupakan potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Secara teori, potensi energi laut di Indonesia diperkirakan mencapai 288 (dua ratus delapan puluh delapan) GW (termasuk potensi energi *offshore wind* (Kementerian ESDM, 2016). Secara geografis, Indonesia memiliki banyak selat dengan potensi kecepatan arus sekitar 2 m/s yang cukup memadai untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik (Kasharjanto dkk., 2017). Beberapa



kandidat lokasi di Indonesia yang telah diidentifikasi untuk ekstraksi energi pasang surut berdasarkan studi oleh Firdaus dkk. (2017), yaitu Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Boleng, Selat Pantar, dan Selat Mansuar. Energi gelombang laut, apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suplai energi listrik. Pembangkitan energi listrik tenaga gelombang laut memanfaatkan pergerakan gelombang, di mana jumlah energi listrik yang dibangkitkan bergantung pada cepat rambat, tinggi, dan frekuensi gelombang, serta densitas air laut (*Ocean Energy Europe*, 2022 dalam Adiputra dkk., 2023).

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah seperti minyak, gas bumi, dan logam dasar. Selain itu, ada peluang ekonomi dari jasa sumber daya laut dan pemasangan kabel bawah laut untuk infrastruktur komunikasi. Perairan laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam.

Potensi laut yang luas ini pun, dipenuhi oleh produk dan jasa kelautan yang tidak kalah strategis untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Selama ini telah banyak produk dan jasa kelautan yang potensial, namun tata kelola yang optimal perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Ekowisata Bahari, ternyata menyimpan potensi ekonomi tinggi dari ekosistem laut, hingga masyarakat adat dan pengelolaan tradisional dengan atraksi eksotis khas masyarakat pesisir yang unik. Garam digunakan secara luas di sektor konsumsi (rumah tangga, hotel, restoran) dan industri (pangan, farmasi, tekstil, klor alkali, dll.), menunjukkan permintaan yang tinggi. Upaya ini mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kesejahteraan petambak dan industri hilir (Kemenperin, 2022)

Adapun Potensi Produk dan Jasa Kelautan untuk Ekonomi Baru, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Biofarmakologi Laut: Laut Indonesia kaya akan spesies mikroalga dan biota laut lain yang memiliki potensi dalam pengembangan produk farmasi, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memanfaatkan potensi ini secara komersial; 2) Produksi Garam dan Turunannya: Indonesia memiliki potensi tambak garam tinggi tetapi efisiensinya masih rendah karena sebagian besar menggunakan metode konvensional. Adopsi teknologi *geomembrane* untuk meningkatkan produktivitas garam; 3) Jasa Kelautan dan Konservasi: Sektor ini mencakup ekowisata berbasis laut, seperti wisata mangrove dan terumbu karang, serta jasa lingkungan lainnya seperti karbon biru yang memanfaatkan kemampuan mangrove dan lamun menyerap karbon; 4) Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Tradisional: Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dapat menjadi model pengelolaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Contohnya adalah sasi laut di Maluku yang mengatur pengelolaan sumber daya



dengan prinsip konservasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang mandat penting dalam melestarikan ekosistem pesisir, laut, dan sumber daya perikanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, inovasi pendanaan menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan keberlanjutan program konservasi dan pengelolaan lingkungan. Dengan mengoptimalkan berbagai mekanisme pendanaan, KKP dapat memperluas cakupan konservasi sekaligus meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Beberapa inovasi pendanaan yang berfokus pada konservasi dan pengelolaan lingkungan di KKP antara lain '*Indonesia Coral Bond*' atau Obligasi Terumbu Karang Indonesia. Obligasi Terumbu Karang Indonesia merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada tahun 2045. Selain itu juga terdapat kerjasama dengan mitra, seperti Korea melalui pendekatan *rig-to-reef*, turut memberikan dampak positif bagi konservasi.

Selain itu, skema pendanaan inovatif lainnya adalah *The Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act* (TFCCA), yang merupakan perjanjian pengalihan pembayaran utang Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mendanai konservasi terumbu karang. Program ini melibatkan pendanaan sebesar USD 35 juta dalam kurun waktu 6-8 tahun dan difokuskan pada perlindungan ekosistem laut tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Semua inovasi ini sejalan dengan regulasi di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan landasan hukum kuat untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektoral, kolaborasi internasional, dan pendekatan berbasis bukti ilmiah, KKP dapat memperkuat ekonomi berbasis kelautan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayatinya yang besar, pemanfaatannya seringkali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Kondisi keterisolasian di pulau-pulau kecil menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan. Di provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Gorontalo, aksesibilitas cenderung sulit akibat kondisi topografi yang dipisahkan oleh pegunungan, lembah, atau terdistribusi di pulau-pulau kecil. Hal ini menghambat mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat. Keterisolasian ini, sebagai dampak dari kondisi topografi yang sulit, merupakan penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi dengan kemiskinan tinggi tersebut terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan masih memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat terbatas (Bappenas, 2018).



Berdasarkan hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2024, terdapat 309 spesies biota perairan rentan mengalami ancaman kepunahan dan direkomendasikan untuk diprioritaskan upaya perlindungannya. Kerentanan terhadap ancaman kepunahan tersebut disebabkan antara lain oleh penangkapan berlebih, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, kerusakan habitat, pencemaran, masuknya jenis asing invasif (JAI) yang merugikan dan pembangunan bendungan yang memutus jalur migrasi pemijahan. Selain itu, keanekaragaman genetik dan kualitas genetik biota perairan juga mengalami ancaman yang serius sejalan dengan tingginya ancaman kepunahan spesies dan masuknya spesies hasil rekayasa genetika ke habitat alami.

Kebocoran sampah ke laut hingga saat ini menjadi tantangan nyata dalam mempertahankan kesehatan laut. Sampah di laut khususnya sampah plastik sebagai penyebab tercemarnya air laut, berdampak terhadap ekologi, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar seperti hilangnya keanekaragaman hayati, kematian biota laut, berkurangnya estetika di pesisir dan laut, serta kerugian ekonomi masyarakat. Kebocoran sampah dari darat ke laut mencapai 80%, dan 30% merupakan sampah plastik (KLHK 2017), sehingga Pemerintah Indonesia menyatakan sebagai Darurat Sampah. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis dan ekstrim dalam penanganan sampah laut melalui kebijakan pengurangan sampah laut sebagaimana tertuang dalam Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Faktor utama penyebab kebocoran sampah plastik di laut umumnya disebabkan oleh kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah, kurang efektif dan memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah darat, serta dukungan penganggaran pengelolaan sampah. Tahun 2021 Lourens J.J Meijer et al, 2021 merilis data riset negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar, Indonesia berada di peringkat ke-5 setelah China dengan total sampah plastik di laut mencapai 56.333 metrik ton/tahun. Tahun 2024, World Population Review merilis data riset negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar, Indonesia turun peringkat ke-7 setelah Jerman dengan total sampah plastik di laut mencapai 3.6 M metrik ton/tahun.

Perubahan iklim merupakan ancaman bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dampak signifikan perubahan iklim mengancam kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi garda terdepan. Ancaman utama dari perubahan iklim adalah naiknya permukaan laut (*sea level rise*) yang disebabkan oleh pemuatan air laut dan mencairnya es di kutub. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) memproyeksikan akan terjadi kenaikan permukaan air laut global rata-rata bisa mencapai 0,63 hingga 1,01 meter pada tahun 2100 dan bahkan mencapai 2 meter jika diasumsikan es Antartika mencair seluruhnya.

Bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan keberlangsungan kehidupan di pesisir Indonesia, ancaman perubahan iklim terjadi melalui peningkatan variabilitas curah hujan, kenaikan suhu permukaan laut, ketidakaturan pola arus dan salinitas, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang tinggi. Kondisi seperti ini



akan berdampak pada perubahan pola migrasi ikan yang merugikan bagi penangkap ikan khususnya bagi nelayan kecil. Di sisi lain, terjadi kerusakan terumbu karang, hilangnya daerah pembesaran ikan, pergeseran musim dan lokasi penangkapan, serta penurunan produktivitas perairan pesisir. Dampak ekonomi dirasakan oleh masyarakat nelayan karena penurunan pendapatan akibat turunnya volume ikan yang ditangkap. Dalam lingkup yang lebih luas, penurunan volume hasil tangkapan ikan akan mengganggu rantai pasok dan penurunan PDRB wilayah pesisir.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPK tahun 2025 – 2029 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator serta target indikator kinerja DJPK Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 - 2029

Pengelolaan kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN tersebut, dengan fokus pada transformasi ekonomi, penguatan ekonomi biru, ketahanan wilayah pesisir, serta mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**, pembangunan sektor kelautan diarahkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan nilai tambah ekonomi, perlindungan ekosistem laut, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peran sentral dalam mengoperasionalkan agenda tersebut melalui kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan. Arah pembangunan sektor ini dituangkan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2025, dengan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) memiliki mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 193 Tahun 2024. Sejalan dengan mandat tersebut, Rencana Strategis (Renstra) DJPK Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dengan Renstra KKP Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya, dinamika kebijakan nasional dan global, potensi serta permasalahan pengelolaan kelautan, dan tantangan pembangunan jangka menengah sektor kelautan.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama Penguatan Transformasi. Untuk itu di dalam

RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesenambungan Pembangunan.

2.2 Visi

Visi pembangunan nasional tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad dan tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045. Sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut nasional periode 2025–2029.

Dalam kerangka tersebut, visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Melalui visi tersebut, KKP berupaya mewujudkan tiga tujuan utama pembangunan, yaitu: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, DJPK merumuskan visi untuk periode 2025–2029, yaitu **“Terwujudnya Pengelolaan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Laut Sehat, Konservasi Kuat dan Masyarakat Sejahtera dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.”** Visi tersebut menegaskan peran DJPK dalam memastikan pengelolaan kelautan yang efektif, inklusif, dan melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

2.3 Misi

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, pembangunan nasional dijabarkan ke dalam delapan Misi (Asta Cita) sebagai landasan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, memberikan kontribusi terhadap tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Kontribusi ini terutama terkait penguatan keberlanjutan ekosistem laut,

pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kualitas tata kelola sektor kelautan.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, KKP menetapkan empat misi utama, yaitu:

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Sejalan dengan misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) menjalankan peran yang lebih operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. DJPK berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, melalui penguatan perlindungan ekosistem laut, konservasi perairan, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan tata kelola pengelolaan kelautan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran ini menempatkan DJPK sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis ekonomi biru nasional.

Berdasarkan mandat tersebut, **misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029** dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Memulihkan dan mencegah kerusakan ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatkan produktivitas sumberdaya kelautan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatkan kontribusi ekonomi subsektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang bersih, efektif, dan berkualitas.

2.4 Tujuan

Berdasarkan mandat pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut, serta kontribusi DJPK terhadap pembangunan kelautan dan perikanan, maka **tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029** dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya



- kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatnya pemulihan dan ketahanan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatnya produktivitas sumber daya kelautan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatnya pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang akuntabel, bersih, dan efektif.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi perairan, serta perlindungan lingkungan laut, DJPK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan nasional. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DJPK harus selaras dengan arah kebijakan kementerian, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP yang menekankan perlindungan ekosistem laut, pengurangan sampah laut, peningkatan produktivitas garam, dan percepatan pembangunan pulau-pulau kecil. Berdasarkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) KKP terdapat 4 Sasaran Program DJPK yang mendukung Sasaran Strategis KKP Tahun 2025-2029 dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategi (SS) 1 dan 2 KKP terhadap DJPK Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
				2025	2029
1	SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha)	30	32,5
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	70
2	SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta	1	Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25	3
		2	Indeks Pembangunan Pulau - Pulau Kecil (indeks)	0,49	0,61

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2025	2029
	Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3 Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	18

Sebagai turunan operasional dari Sasaran Strategis KKP, Sasaran Program DJPK Tahun 2025–2029 terdiri atas 3 (tiga) Program (Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan perikanan dan kelautan, Program Dukungan Manajemen) dan 11 (sebelas) Sasaran Program (SP) yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Sasaran Program DJPK Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		
			2025	2029	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang Efektif Dikelola (Juta Hektar)	18,50	21,50
2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420	460
3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (lokasi)	2	242
4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali (lokasi)	1	29
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN					
5	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Dikelola (kumulatif) (kawasan)	3	14

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	
				2025	2029
6	Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)	6	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	-	103
7	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	7	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	93
8	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	8	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30	50
9	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan Ekonomi Petambak Garam	9	Unit Usaha Petambak Garam yang Ditingkatkan Kelembagaan Ekonominya (Unit)	-	18
10	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	10	Nilai investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500	900
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengelolaan Kelautan	11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup DJPK (Nilai)	86	88

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPK Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2025, DJPK mendukung 3 Program, 9 Sasaran Program dan 9 Indikator Kinerja. Program Lingkungan Hidup mencakup 4 Sasaran Program yaitu: (1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi, dan/atau Appendikx CITES terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (3) Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (4) Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan terdiri dari 4 Sasaran Program yaitu (1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja; (2) Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam 1 (satu) indikator kinerja; (3) Meningkatnya Kualitas Produksi Garam; dan (4) Meningkatnya Investasi

Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan. Program Dukungan Manajemen terdiri atas 1 Sasaran Program yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025 antara lain :

1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang Efektif Dikelola (juta hektar)
2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)
3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)
5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)
7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)
8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)
9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPK Tahun 2025

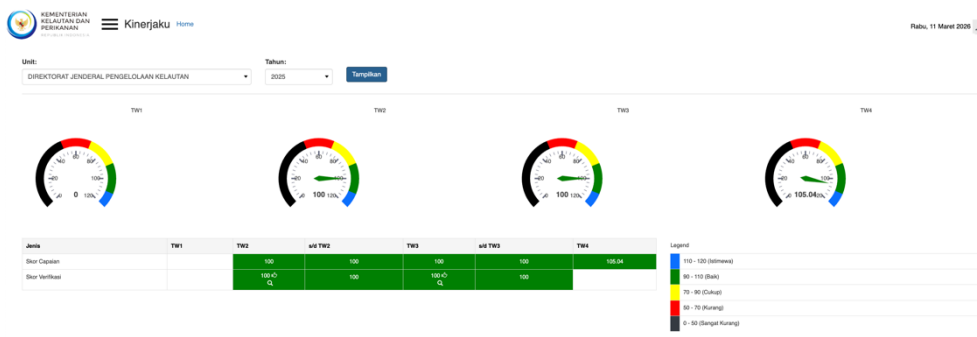
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2.	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3.	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	2
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	5.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6.	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7.	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8.	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Indikator kinerja DJPK tahun 2025 terdiri dari 9 indikator kinerja. Matriks Target dan Capaian realisasi tahun 2025 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPK tahun 2025 adalah **105,04 (Predikat Baik)**.



Gambar 4. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

Tabel 4. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPK

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Kinerjaku
1. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	18,5	100%
2. Meningkatkan Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420	420	100%
3. Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	3	120%
4. Meningkatkan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali (Lokasi)	2	8	120%
5. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	3	100%
6. Meningkatkan Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	52,13	62,81%

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Kinerjaku
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30	61,07	120%
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500	18.822	120%
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86	88,18	102,53%

Ket. : (1) 120% adalah persentase maksimal pada SAPK; (2) Tabel warna biru berarti melampaui target, hijau berarti mencapai target, merah berarti tidak mencapai target

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 9 indikator kinerja tersebut, terdapat 8 indikator kinerja (IKU) yang berhasil mencapai atau melampaui target yaitu Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola; Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang dikelola; Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah); Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali; Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola; Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1); Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan; serta Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan. Namun, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Produktivitas lahan garam rakyat.

Capaian kegiatan Ditjen PK pada Tahun 2025 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai Program Kualitas Lingkungan Hidup menjabarkannya dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha); (2) Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi); (3) Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi); dan (4) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi).

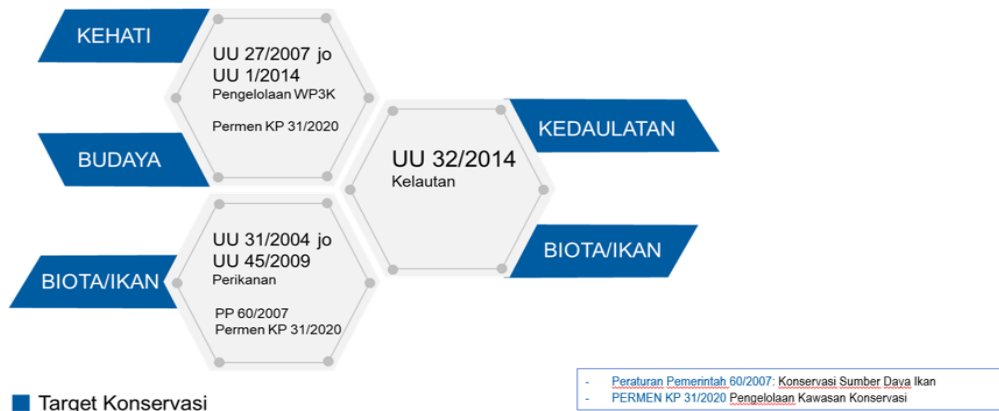
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil

IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi memiliki manfaat secara ekologis, ekonomi, sosial budaya, dan secara global. Indikator kinerja ini berkaitan dengan indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

yang tercantum dalam indikator kinerja KKP dengan target 30 Juta Ha hingga tahun 2025 telah tercapai 30,97 Juta Ha dengan penambahan luas total 1,079 Juta Ha dari capaian tahun 2024.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 5. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kegiatan pengelolaan mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Dalam pelaksanaan pengelolaannya, mengikuti PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi.

Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

Evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Teknik menghitung IKU 1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha), yaitu menjumlahkan kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan telah dilakukan penilaian mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup					
SP 1.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil					
IKU – 1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)					
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target 2029	% Capaian
17,8	18,5 Juta Ha	-	100%	18,5 Juta Ha	21,5 Juta Ha	86,04%

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025

Pada tahun 2025, capaian indikator luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif dikelola memiliki target sebesar 18,5 juta hektar, untuk rincian capaian disampaikan pada **Lampiran 3**. Target ini telah berhasil dicapai sebesar 100% dengan total luas kawasan konservasi sebesar 18,5 juta hektar, yang terdiri dari:

1. 11 (sebelas) Kawasan Konservasi Nasional seluas 5.355.406,84 Ha dan
2. 108 (seratus delapan) Kawasan Konservasi Daerah seluas 13.242.635,30 Ha.

Berdasarkan hasil evaluasi yang tertuang dalam Berita Acara (BA) pleno hasil penilaian EVIKA tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. **49 (empat puluh sembilan) Kawasan Konservasi** dengan total luas kawasan 6.246.621,14 Ha memiliki status **Dikelola Minimum (Perunggu)**,
2. **58 (lima puluh delapan) Kawasan Konservasi** dengan total luas Kawasan 5.505.318,12 Ha memiliki status **Dikelola Optimum (Perak)**, dan
3. **12 (dua belas) Kawasan Konservasi** dengan total luas Kawasan 6.846.102,88 Ha memiliki status **Dikelola Berkelanjutan (Emas)**.

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi secara efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Pada tahun 2025, luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola mencapai 18,5 juta hektar. Capaian tersebut meningkat sebesar 700 ribu hektar atau 3,93% dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar 17,8 juta hektar. Rata-rata peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada 17,8 juta ha dari baseline tahun 2024 yaitu sebesar 3,93% disebabkan adanya peningkatan pada kriteria input, proses dan output.

Namun, jika dilihat berdasarkan hasil EVIKA terdapat penurunan capaian pada kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (emas) dimana capaian pada tahun 2024 yakni sebanyak 13 kawasan sedangkan capaian pada tahun 2025 hanya sebanyak 12 kawasan. Hal tersebut disebabkan oleh Kawasan Konservasi Nusa Penida mengalami penurunan anggaran yang berdampak pada pengelolaan kawasan hanya bisa dilakukan secara terbatas.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Pada tahun 2025, capaian indikator luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif dikelola sebesar 18,5 juta hektar memiliki target pada Rencana Strategis DJPK 2025 – 2029 sebesar 21,5 juta hektar. Persentase yang berhasil dicapai jika dibandingkan dengan target yakni sebesar 86,04%. Diperlukan 3 juta hektar lagi untuk memastikan indikator kinerja ini berhasil tercapai pada akhir periode Renstra DJPK 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional



Pada 2030, Pemerintah Indonesia telah menargetkan 10 persen dari total wilayah laut atau sekitar 32,5 juta hektar (ha), untuk ditetapkan, dioperasikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai KKP. Target ini sejalan dengan pencapaian Target Aichi (Rencana Strategis Konvensi Keanekaragaman Hayati/CBD 2011-2020) dan Tujuan ke-14 dari Pembangunan Berkelanjutan “Kehidupan Bawah Laut”. Berdasarkan hal tersebut Jika dibandingkan dengan capaian indikator kinerja ini sebesar 18,5 juta hektar maka persentase capaian terhadap perbandingan target CBD yaitu sebesar 56,92%.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 didukung oleh kolaborasi yang kuat dengan mitra konservasi yang memegang peran penting dalam mempercepat implementasi program dan memastikan ketercapaian target yang telah ditetapkan. Meskipun indikator telah tercapai melebihi target yang ditetapkan, terdapat kendala yang ditemukan di lapangan yang berpengaruh terhadap penurunan jumlah kawasan konservasi yang berstatus emas pada Kawasan Konservasi Nusa Penida. Penurunan status Evika Kawasan Konservasi Nusa Penida salah satunya disebabkan oleh belum terdapat mekanisme pendanaan berkelanjutan (bergantung pada APBN, APBD dan mitra) serta terbatasnya kompetensi SDM pengelola kawasan. Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan pada masa mendatang antara lain penguatan kelembagaan kawasan konservasi untuk meningkatkan peluang pendanaan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas pengelola kawasan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga terkait serta mitra konservasi. Pendekatan ini memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik dalam bentuk keahlian, pendanaan, maupun fasilitas pendukung, sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi.

Sinergi yang terjalin antara berbagai pihak juga berkontribusi pada penyelarasan program, pengurangan duplikasi kegiatan, dan peningkatan kapasitas bersama. Dengan demikian, efisiensi sumber daya tidak hanya dicapai dari sisi operasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi.

G. Kegiatan Pendukung

- 1) Rapat Revisi Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 2) Rapat Persiapan Penilaian dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen EVIKA;
- 3) Rapat Penjelasan Penyusunan Diagram Alir Template SOP;
- 4) Sosialisasi dan Penguatan Aparatur tentang Daya Dukung Kawasan

- Konservasi;
 - 5) Rapat Koordinasi Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - 6) Finalisasi Tata Cara Penilaian dan Penyusunan Draft Petunjuk Teknis EVIKA 2.0.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
- 1) NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
 - 2) Penyiapan Dokumen Revisi PERMEN KP 31 Tahun 2020;
 - 3) Peningkatan kapasitas pengelola Kawasan konservasi;
 - 4) Penyusunan profil Kawasan Konservasi;
 - 5) Koordinasi fasilitasi pembangunan infrastruktur LAUTRA;
 - 6) Perizinan produk konservasi ekosistem;
 - 7) Integrasi Data Lokasi Lautra ke dalam SIDAko.

3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES

IKU 2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan yaitu a) melindungi jenis ikan terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Didalam Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwa “Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: (a) penggolongan jenis ikan; (b) penetapan status perlindungan jenis ikan; (c) pemeliharaan; (d) pengembangbiakan; dan (e) penelitian dan pengembangan”.

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, maka diperlukan adanya alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya yang telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES.

Penilaian tersebut mengacu pada Keputusan Dirjen PRL Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Terancam Punah Dan/Atau Dilindungi (E-PANJI). Aspek penilaian meliputi empat kriteria/tahapan yaitu: (1) input/perencanaan, (2) proses/implementasi, (3) output/luaran dan (4) outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria. Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan kedepannya.

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam. Hasil kajian Pokja Biota Perairan Terancam Punah BRIN pada tahun 2023 setidaknya merekomendasikan 309 biota perairan terancam punah perlu ditetapkan status perlindungannya.

Beberapa upaya konservasi terhadap biota perairan yang terancam punah telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya upaya perlindungan. Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya perlindungan dilakukan melalui:

1. Penetapan status perlindungan biota perairan terancam punah (Kepmen KP 66 Tahun 2025);
2. Penyediaan data Informasi biota perairan dilindungi/Terancam Punah;
3. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
4. Penetapan Jenis Asing Invasif;
5. Penyadartahuan, Edukasi Dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES;
6. Penyusunan dan reviu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES;
7. Bimbingan Teknis Perlindungan Biota Perairan terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES.

Adapun Jumlah kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya, terdiri dari:

- a. Jenis Ikan yang dilindungi penuh (19 Spesies)
- b. Jenis Ikan yang dilindungi terbatas (9 spesies)
- c. Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES (95 spesies)
- d. Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES (320 spesies)

Adapun capaian indikator ini pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup					
SP 1.2	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES					
IKU – 2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)					
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	enaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target 2029	% Capaian
-	420 Spesies	-	100%	420 Spesies	460 Spesies	91,30%

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025

Capaian IKU Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola sebesar 420 spesies sesuai Nota Dinas Direktur KSG Nomor 29/DJPK.3/TU.210/II/2026 Tanggal 14 Januari 2026 untuk rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 4**. Perhitungan capaian IKU ini melalui kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pelayanan perizinan meliputi:

1. Perlindungan

- a) Penilaian EPANJI Tahun 2025 yang dilakukan terhadap 25 jenis ikan;
- b) Penetapan status perlindungan untuk 48 jenis biota perairan sesuai KEPMEN KP Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

2. Pelestarian

Biota Perairan yang Dilakukan Upaya Pelestarian (Jenis) sebanyak dua jenis, yaitu jenis sidat dan buaya melalui kegiatan antara lain:

a) Sidat

- Pelaksanaan restocking ikan sidat spesies *Anguilla bicolor* hasil pengembangbiakan oleh PT. Ika Nusa Windutama di Sungai Cimandiri, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
- Reviu petunjuk teknis restocking/pelepasliaran Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES.
- Penetapan Petunjuk Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 24 Tahun 2025.

b) Buaya

- Penetapan Petunjuk Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 24 Tahun 2025.

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 8 - 13 Desember 2025.

3. Pemanfaatan

- a) Penetapan Kuota Ekspor tambahan Bulan Oktober – Desember Tahun 2025 jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES hasil pengambilan dari alam kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Perdagangan Luar Negeri;
- b) Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam dalam Appendiks CITES Tahun 2025 kepada pelaku usaha pemilik SIPJI Pengembangbiakan;
- c) Penetapan Kuota penelitian dan pengembangan untuk jenis ikan Sidat (*Anguilla Sp.*) dan Ikan Belida (*Chitala sp.* dan *Notopterus sp.*);
- d) Usulan Draft Kepdirjen tentang Penetapan Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (CITES) Tahun 2026;
- e) Finalisasi Penyusunan NDF Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES;
- f) Kegiatan Standar Kualifikasi Pemanfaatan Jenis Ikan tahun 2025 untuk Pengembangbiakan (Arwana dan Kuda Laut) dan Pemeliharaan (Hiu Paus dan Pari Manta);

4. Pelayanan Perizinan

Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan sebesar 91 melalui kegiatan fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau *look alike* spesies, dengan rincian pelayanan perizinan sampai Tahun 2025 yaitu:

- a) Jumlah Perizinan SIPJI yang terbit selama Triwulan IV adalah sebanyak 201 SIPJI.
- b) Jumlah Dokumen Angkut SAJI LN yang terbit selama Triwulan IV adalah sebanyak
 - SAJI LN Ekspor sebanyak 746 dokumen;
 - SAJI LN Impor sebanyak 45 dokumen;
 - SAJI LN Re-Ekspor sebanyak 22 dokumen;
 - SAJI LN Ekspor (Non-Appendiks CITES) sebanyak 623 dokumen;
 - SAJI LN Arwana sebanyak 1557 dokumen.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian pada Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 karena merupakan IKU baru.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan capaian pada tahun 2025 indikator kinerja ini yaitu sebesar 420 spesies jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 sebesar 460 spesies persentase capaian yang diperoleh sebesar 91,30%. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, kebutuhan jumlah spesies agar indikator kinerja ini berhasil mencapai target Renstra 2025 - 2029 sebesar 40 spesies.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On Biological Diversity* melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati global. Sejak tahun 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati, yang diperbaharui menjadi Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indonesia/Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2020, dan disesuaikan dengan Target Aichi menjadi IBSAP 2015-2020. Seiring dengan berakhirnya implementasi IBSAP 2015–2020, IBSAP 2025–2045 disusun untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional. Dokumen IBSAP 2025-2045 terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah.

Indikator kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola berkontribusi untuk pencapaian target pada IBSAP 2025-2045, secara khusus pada Tujuan 1 (satu) untuk memperkuat integrasi dan ketahanan ekosistem dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko kepunahan spesies, dan menjaga keanekaragaman genetik, melalui target nasional ke 4 (empat) yaitu terwujudnya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman spesies dan genetik. Dalam pencapaian target nasional tersebut indikator yang dapat dibandingkan dengan indikator kinerja Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES antara lain indikator 4.5.8. Jumlah kegiatan penanganan biota perairan terdampar; 4.6.3. Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies; 4.6.3. Jumlah rencana aksi nasional konservasi spesies dan 4.7.1. Nilai efektivitas pengelolaan spesies ikan dilindungi dan/atau terancam punah.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Faktor yang mendukung tercapainya indikator ini pada tahun 2025 antara lain

dukungan dari mitra konservasi, komitmen pemanfaatan jenis ikan dilindungi secara berkelanjutan, tersedianya Petunjuk Teknis Penanganan Konflik antara Manusia dengan Buaya, dan tersedianya dokumen Non-Detriment Finding (NDF) jenis prioritas yang disusun berdasarkan data ilmiah dan disahkan oleh otoritas CITES. Meskipun minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS serta kajian stok perikanan Hiu dan Pari, masalah tersebut dapat diatasi melalui kerjasama dengan mitra konservasi dalam rangka menghimpun data dan memetakan alur migrasi biota perairan dilindungi/terancam punah dan keahlian GIS.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - Komunikasi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) dan pelayanan peredaran jenis ikan dilindungi.
- G. Kegiatan Pendukung
 - 1) Penetapan jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh melalui Kepmen KP Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi
 - 2) Penyusunan NSPK biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES
 - 3) Penyusunan dokumen Non-Detriment Finding (NDF)
 - 4) Penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam
 - 5) Penetapan Batas Maksimum Pemanfaatan Tahun 2025
 - 6) Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Tahun 2025
 - 7) Pelayanan Perizinan Penerbitan SAJI LN
 - 8) Pelayanan Perizinan Penerbitan SIPJI
 - 9) Penyusunan draft RAN Konservasi Jenis Ikan untuk jenis Penyu, Cetacean, Duyung, Karang, dan Pesut;
 - 10) Penyiapan bahan edukasi jenis ikan, reptil dan mamalia perairan yang dilindungi di Indonesia
 - 11) Penyediaan/reviu NSPK pendataan/monitoring populasi
 - 12) Penyediaan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Biota Perairan Dilindungi dalam bentuk *geodatabase*;
 - 13) Penyadartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;
 - 14) Peningkatan kapasitas SDM berupa bimbingan teknis;
 - 15) Dukungan Pelaksanaan Restocking Sidat PT Ika Nusa Windutama; dan Pendampingan Pelepasliaran Sidat.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
 - 1) Penentuan dan pembentukan Tim Penilai EPANJI 2026;
 - 2) Penetapan status perlindungan dan keterancam jenis ikan;
 - 3) Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan;
 - 4) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Upaya Pelestarian Spesies dan

- Genetik;
- 5) Penetapan Ukuran, Lokasi dan Waktu Pelepasliaran Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES;
 - 6) Koordinasi dengan UPT Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan terkait dengan pelaksanaan upaya *restocking*/pelepasliaran hasil pengembangbiakan jenis ikan dilindungi dan/atau Tercantum dalam Appendiks CITES; dan
 - 7) Penyusunan NSPK pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi terbatas berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Appendiks II CITES.

3.1.3 SP 1.3 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih

IKU 3. Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 03 “Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih”. Kehadiran sampah merupakan salah satu permasalahan pelik di lingkungan karena ketersebaran sampah tidak hanya ditemukan pada daratan, tetapi juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, *marine debris* adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya. Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan.

Pengendalian sampah laut di wilayah pesisir dan laut membutuhkan strategi terpadu, meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan sampah yang baik, penegakan hukum, dan kolaborasi antar pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Salah satu dasar hukum yang mendukung Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton) adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif) (Lokasi), antara lain:

1. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Desa Pesisir Bersih (DPB)

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kegiatan pendukung Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif) (Lokasi) dalam rangka menjaga kebersihan laut dari sampah dalam rangka mewujudkan laut sehat bebas sampah (Laut Sebasah). Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) sebagai suatu gerakan untuk menjaga kebersihan laut dari sampah, terutama sampah plastik, yang berdampak negatif pada ekosistem laut dan kesehatan manusia. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat, untuk mengurangi sampah di laut dan menjaga kelestarian laut.

Formula penghitungan IKU ini adalah dengan menghitung jumlah lokasi yang dilakukan kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) dan pengelolaan sampah dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB) serta “Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah)”. Secara rinci capaian IKU 03 disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Capaian Indikator Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup					
SP 1.3	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih					
IKU – 3	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)					
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target 2029	% Capaian
-	3 Lokasi	1	120%	2 Lokasi	242	1,23%

- A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025
Target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif) (Lokasi)” pada tahun 2025 sebanyak 2

lokasi dengan capaian sebanyak 3 lokasi yaitu di (1) Kabupaten Badung, (2) Kota Denpasar, dan (3) Kabupaten Lombok Utara sehingga capaian kinerja sebesar 150% atau capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP. Rincian hasil kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 5** dengan jumlah sampah yang terkumpul sebanyak 93,09 ton. Capaian IKU ini diperoleh dari:

1. Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedongan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan ini melibatkan 8.600 peserta dengan total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg, dengan rincian berdasarkan sumber dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra sebagai berikut:
 - a) Organik/kayu: 5.176,9 kg.
 - b) Non Organik: 3.426,2 kg.
 - c) Campur: 68.475,3 kg.

Beberapa dokumentasi kegiatan sebagai berikut :





Gambar 6. Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedongan, Kabupaten Badung, Bali

2. Penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (berupa Kendaraan Roda Tiga VIAR Karya 150 RLn, Kano 10 unit, *life jacket* 20 unit, serokan 100 unit, *trash bag* 320 unit, papan informasi 1 unit) di 1 lokasi yaitu KUB Simbar Segara, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 15,72 Ton pada tahun 2025. Serah terima Bantuan Pemerintah (BP) tersebut dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. BA 05/DJPK.1/PL.600/V/2025 Tanggal 30 Mei 2025.

Beberapa foto bantuan sarana pengelolaan sampah di Kota Denpasar disajikan di bawah ini.



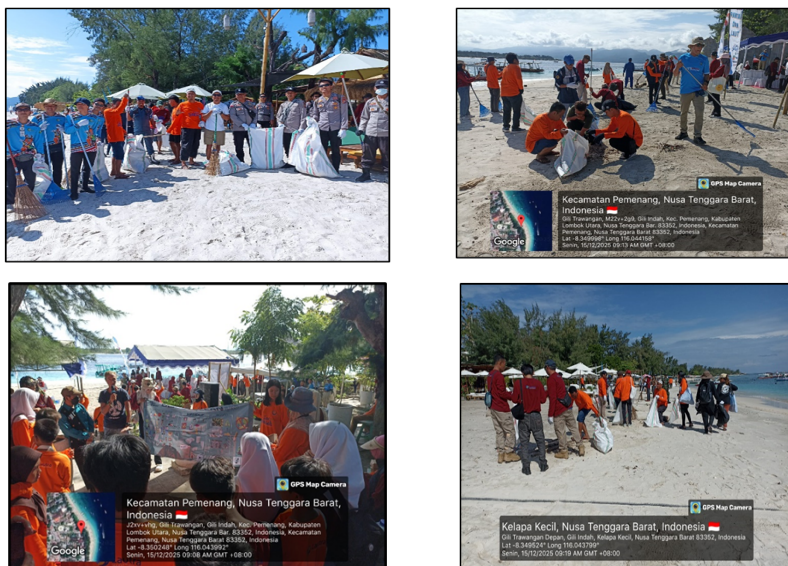


Gambar 7. Bantuan Sarana Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar

3. Pelaksanaan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pulau Gili Trawangan pada tanggal 15 Desember 2025. Kegiatan ABPL ini diikuti oleh peserta dari Pemprov NTB, Pemkab. Lombok Utara, Lembaga Adat, Pokmaswas, Pokdarwis, Proyek Penyu, Gili Island Dive Alliance (GIDA), Yayasan Ekologi Gili Indonesia (YEGI), Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT), Pemerintah Desa, Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut (YEKHALI), Kelompok Meno Lestari, Kelompok Gili Care, serta Kelompok Front Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) Trawangan. Total peserta yang terlibat dalam kegiatan ini +/- 450 orang. Total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai +/- 287 kilogram (kg) yang didominasi sampah anorganik dari aktivitas pariwisata dan rumah tangga.

Beberapa foto kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pulau Gili Trawangan pada tanggal 15 Desember 2025 disajikan di bawah ini.





Gambar 8. Foto Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) di Pulau Gili Trawangan

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
 IKU “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 2 lokasi sedangkan capaian sebanyak 3 lokasi, dan tidak ada IKU ini pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
 Capaian IKU “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” pada tahun 2025 sebanyak 3 lokasi, sedangkan target IKU ini pada akhir periode Renstra DJPK Tahun 2025–2029 sebanyak 242 lokasi sehingga persentase capaian 2025 sebesar 1,23%.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
 Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada target 14.1 disebutkan untuk mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi pada tahun 2025. Selain itu, dalam dokumen RPJMN 2025 – 2029 kontribusi dalam pengelolaan sampah juga dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Persentase Sampah yang Dikelola dengan target 39,01%. Target tersebut secara khusus adalah pengelolaan sampah di hulu sebagai salah satu sumber sampah yang mendominasi masuk ke laut.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

IKU ini dapat melewati target yang ditetapkan dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti pelajar dan mahasiswa, komunitas dan organisasi lingkungan, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat. Bentuk dukungan para pihak pemangku kepentingan dalam penanganan sampah laut tersebut dijelaskan lebih rinci pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 9. Bentuk Dukungan Para Pihak Pemangku Kepentingan

No.	Pihak Pemangku Kepentingan	Bentuk Dukungan dalam Penanganan Sampah Laut
1.	Pemerintah Pusat (KKP dan K/L Lain)	a) KKP bekerjasama lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam upaya pembersihan sampah di laut. b) KKP memberikan bantuan sarana/prasarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih (DPB)
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)	Pemda turut membina masyarakat dan kelompok penggerak lingkungan, serta mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah terintegrasi.
3.	Pelajar dan mahasiswa	Pelajar dan mahasiswa terlibat dalam aksi bersih-bersih sampah laut dan sebagai inisiator kampanye kesadaran lingkungan.
4.	Komunitas dan Organisasi Lingkungan	Komunitas dan organisasi lingkungan berperan dalam pembersihan, pemilahan, dan daur ulang sampah plastik, serta memberikan pemahaman, mengedukasi, memberdayakan masyarakat.
5.	Lembaga Swasta dan Perguruan Tinggi/Universitas	Lembaga swasta dan perguruan tinggi/universitas sebagai mitra strategis dalam program.
6.	Masyarakat Pesisir dan Nelayan	Masyarakat pesisir dan nelayan terlibat aktif dalam Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), Gerakan Nasional Cinta Laut (Gernas BCL), dan program Laut SEBASA untuk membersihkan sampah dari laut.

Pelaksanaan kegiatan sempat melambat dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025.

Akan tetapi, masalah tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik di pusat maupun di daerah, penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan *zoom meeting*, serta perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU 03 “Pesisir dan/atau Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Kumulatif (Lokasi)” pada tahun 2025 sebagai berikut:
- a) Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
 - b) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui *online* dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali 16 – 20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg atau setara 77,078 ton;
 - 3) *Workshop Consolidations and Coordination* Pengelolaan Sampah Laut di Kawasan Konservasi Perairan dan Pembiayaannya;
 - 4) Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Terintegrasi;
 - 5) Pembahasan Pengembangan Sistem Informasi Sampah Laut Terpadu (SiSalut);
 - 6) Perhitungan Capaian Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) Tahun 2024;
 - 7) *High Level Meeting* Koordinasi Pembahasan Draft Revisi Peraturan Presiden Terkait Pengelolaan;
 - 8) *Workshop on Mitigation and Strategic Policy for Combating Microplastic Pollution for Marine and Freshwater Fisheries in Southeast Asia Region*;
 - 9) Koordinasi Evaluasi Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan;

- 10) Pelatihan Produk Olahan Sampah di SDN Kamal Muara 01, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
- 11) *Kick off Program Laut SEBASA*;
- 12) *Launching AFD Technical Assistance to support National Action Plan on marine debris reduction in Indonesia : Improvement of the management of fishing gears to reduce marine pollution*;
- 13) *Focus Group Discussion* Integrasi Pengelolaan Sampah Hulu ke Hilir Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA);
- 14) FGD Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Data Geospasial; dan
- 15) Aksi Bersih Pantai dan Laut Gili Trawangan di Gili Trawangan, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi pada tahun 2026 antara lain koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

3.1.4 SP 1.4 : Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali

IKU 4. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” masuk dalam Sasaran Program 04 “Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”. IKU ini memiliki target 2 lokasi pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak adalah suatu kondisi menurunnya kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya yang dapat diakibatkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali adalah kawasan kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula dilakukan antara lain melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi kawasan pesisir berupa penanaman/penyulaman mangrove

- kembali di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim, penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana, dan kegiatan pendukung lainnya yang dapat membantu mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Upaya rehabilitasi, pengendalian perubahan iklim, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga dapat berperan untuk meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan wilayah tersebut untuk pulih dari kerusakan. Ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kuat, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, akan mempercepat proses pemulihan setelah terjadi bencana atau kerusakan lingkungan. Sebaliknya, jika ketahanan pesisir lemah, proses pemulihan akan berjalan lambat dan mungkin tidak optimal.

Formula penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim.
2. Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi.

Adapun capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup					
SP 1.4	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali					
IKU – 4	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)					
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	8 Lokasi	-	120	2 Lokasi	29	27,68%

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025

Target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” sebanyak 2 lokasi dengan capaian sebanyak 8 lokasi sehingga capaian kinerja sebesar 400% atau capaian kinerja maksimum sebesar 120% berdasarkan aplikasi kinerjaku KKP untuk capaian lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 6**. Capaian IKU ini pada tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di 2 lokasi yaitu Muara Kamal Jakarta Utara dan Gili Trawangan NTB dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Telah dilaksanakan kegiatan Edukasi pengolahan sampah dan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam rangka mendukung Kegiatan Kick Off "Laut Sehat Bebas Sampah (LAUT SEBASAH)" (diikuti 185

- siswa dan 15 guru SDN 1 Kamal Muara) dan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara di Kamal Muara, Jakarta Utara
- b) Telah dilaksanakan Kampanye SPI dalam rangkaian Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASA) tanggal 15 Desember 2025 di Gili Trawangan, Kab. Lombok Utara, NTB (diikuti 400 dengan rincian laki – laki sebanyak 301 dan perempuan sebanyak 99 siswa SDN 2 Gili Indah, SMPN 1 SATAP, SMK Pariwisata Gili Trawangan).
2. Pelaksanaan rehabilitasi mangrove di 6 kawasan seluas 36 Ha dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penanaman mangrove di Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote, Provinsi NTT (6 Ha).
 - b) Penanaman mangrove Desa Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote, Provinsi NTT (18 Ha).
 - c) Penanaman mangrove di Pulau Sika, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi NTT (2,5 Ha).
 - d) Penanaman mangrove di Desa Mutus, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya (3,5 Ha).
 - e) Penanaman mangrove di Desa Ngilngof, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku (5 Ha).
 - f) Penanaman mangrove di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (1 Ha).



Gambar 9. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Rote Ndao



Gambar 10. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Alor



Gambar 11. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Maluku Tenggara



Gambar 12. Rehabilitasi Mangrove di Kab. Raja Ampat



Gambar 13. Rehabilitasi Mangrove di Kamal Muara, Jakarta Utara

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” sebanyak 2 lokasi sedangkan capaian sebanyak 8 lokasi.

Pada tahun 2024 menggunakan nomenklatur IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)” dengan target sebanyak 70 kawasan sedangkan capaian sebanyak 98 kawasan.

Perbedaan penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)” pada tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel. Perbedaan Penghitungan IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” Pada Tahun 2025 dengan IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali” Pada Tahun 2024.

Tabel 11. Perbedaan Formula Penghitungan IKU

Tahun 2025	Tahun 2024
IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)”	IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)”
Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan: 1) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian ketahanannya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui suatu metode berdasarkan indikator, antara lain:	Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan: 1) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan

Tahun 2025 IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)”	Tahun 2024 IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)”
Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana. 2) Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan Perubahan Iklim. 3) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penilaian tingkat nilai rehabilitasinya oleh Tim Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan indikator: pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove dan Penguatan regulasi dalam bidang Rehabilitasi Mangrove. 4) Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi.	Kawasan Pesisir Tangguh. 2) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang teredukasi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. 3) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. 4) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi Pantai. 5) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove. 6) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). 7) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran. 8) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).

- Capaian IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada tahun 2025 dan capaian IKU “Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)” pada tahun 2024 melebihi target di masing-masing-masing tahun (tahun 2025 dan tahun 2024) dan memperoleh capaian kinerja maksimum 120% berdasarkan aplikasi kinerja KKP.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Target IKU 04 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Lokasi)” pada Renstra DJPK 2025 – 2029 sebanyak 29 lokasi sedangkan capaian sebanyak 8 lokasi dengan persentase sebesar 27,68%. Berdasarkan hal tersebut kebutuhan capaian untuk kedepannya agar bisa mencapai target yakni sebesar 21 lokasi.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sejalan dengan komitmen global antara lain Persetujuan Paris (*Paris Agreement*), rehabilitasi serta kontribusi reduksi emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional (*National Determined Contribution/NDC*) sebesar 29% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri dan menjadi 41% jika terdapat kerja sama internasional serta kebijakan *Folu Net Sink* 2030 sebagai inisiatif Indonesia dalam mencapai keseimbangan antara emisi dan absorpsi gas rumah kaca.
- E. Analisis Keberhasilan, Kendala dan Solusi
IKU ini dapat melampaui target karena adanya dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti komunitas dan organisasi lingkungan, pelajar dan mahasiswa, lembaga swasta, perguruan tinggi/universitas, dan kelompok masyarakat. Dasar penentuan kawasan yang dilakukan intervensi untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali adalah Kawasan Mangrove yang berada di luar Kawasan Hutan berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PNM) dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan spesifik untuk ancaman Tsunami, Gelombang Ekstrem dan Abrasi.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
a) Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya; dan
b) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui bantuan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.
- G. Kegiatan Pendukung
1) *Kick-Off Program* ZCRA “Pembangunan Berketahanan Iklim di Pantura

- Jawa Tengah – Tantangan, Strategi, dan Peluang Pendanaan” di Semarang;
- 2) *Workshop* Evaluasi Capaian Aksi Pembangunan Berketahanan Iklim TA 2024 di Jakarta;
 - 3) FGD Data dan Informasi Program Solusi Terpadu untuk Pengelolaan Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial (ISASP);
 - 4) *Focus Group Discussion* Pembangunan Parameter Manual dan Indikator untuk Satu Data Bencana Indonesia (SDBI);
 - 5) Sekolah Pantai Indonesia dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASA) di Kamal Muara Jakarta Utara;
 - 6) Lokakarya Kebijakan Nasional Kenaikan Muka Air Laut dan Pembangunan Infrastruktur Adaptif; dan
 - 7) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputy Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 8) Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025.
 - 9) Serah terima Sertipikat Lahan Kamal Muara, Jakarta Utara Kamal Muara;
 - 10) Kegiatan *Kick Off* "Laut Sehat Bebas Sampah" dan *Groundbreaking* Pengembangan Kawasan Mangrove Nasional Kamal Muara;
 - 11) Monitoring dan Evaluasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pengembangan Pusat Restorasi dan Edukasi Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Ekowisata Silo Baru di Kabupaten Asahan Sumatera Utara Desa Silo Baru, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara;
 - 12) Pembahasan Peta Mangrove di Area Penggunaan Lain;
 - 13) Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Pencemaran, Penanggulangan, Dan Rehabilitasi Tumpahan Minyak Di Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 1 Agustus 2025; dan
 - 14) Finalisasi kajian Kepmen Peta Adaptasi Perubahan Iklim.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi pada tahun 2026 antara lain: koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen Pengelolaan Kelautan (Setditjen PK), Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL), LSM, lembaga swasta, universitas atau perguruan tinggi, tokoh

masyarakat, dan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pesisir dan pulau kecil.

3.2 Program 2 : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan); (2) Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha); (3) Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%); dan (4) Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar).

3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

IKU 5. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Indikator Kinerja Utama (IKU) 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelolai (Kawasan)” masuk dalam Sasaran Program 05 “Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”. IKU ini memiliki target 3 kawasan pada tahun 2025 dengan frekuensi penghitungan atau periode pelaporannya bersifat tahunan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sambil memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan menjaga keutuhan wilayah negara. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik akan memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, juga memiliki peran penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan penghitungan menggunakan tools dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. Ekologi dan lingkungan.
- b. Sosial dan Budaya.
- c. Ekonomi.
- d. Tata Ruang dan Infrastruktur.
- e. Kelembagaan dan Hukum.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan penghitungan menggunakan tools dengan memperhatikan aspek sebagai berikut
 - a. Ekologi dan lingkungan.
 - b. Sosial dan Budaya.
 - c. Ekonomi.
 - d. Tata Ruang dan Infrastruktur.
 - e. Kelembagaan dan Hukum
2. Masing-masing aspek yang mana disampaikan pada butir (point) 1 akan dihitung nilainya.
3. Berdasarkan hasil perhitungan pada butir (point) ke-2 maka diambil point rata-rata keseluruhan untuk melakukan penilaian status Pulau-Pulau Kecil/Terluar sehingga diketahui kategori Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar berdasarkan Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola sebagai berikut.

Tabel 12. Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola

Status	Nilai	Kategori
Terkelola Pra Efektif	< 0,75	Terdata
Terkelola Efektif	≥ 0,75 dan < 1,15	Termanfaatkan
Terkelola Sangat Efektif	> 1,15	Terkelola Efektif

Target dan capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Capaian Indikator Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 2.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil					
IKU – 5	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)					
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	3 Kawasan	-	100%	3 Kawasan	14 kawasan	21,42%

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025

Target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” sebanyak 3 kawasan dengan capaian sebanyak 3 kawasan yaitu (1) Gili Kondo, Kab.Lombok Timur, NTB; (2) Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, NTT; dan (3) Kamal Muara, Jakarta Utara, DK Jakarta sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil pengolahan data dengan menggunakan piranti (tool) pengolah data (Ms Excel) di 3 kawasan diperoleh hasil sebagai berikut:

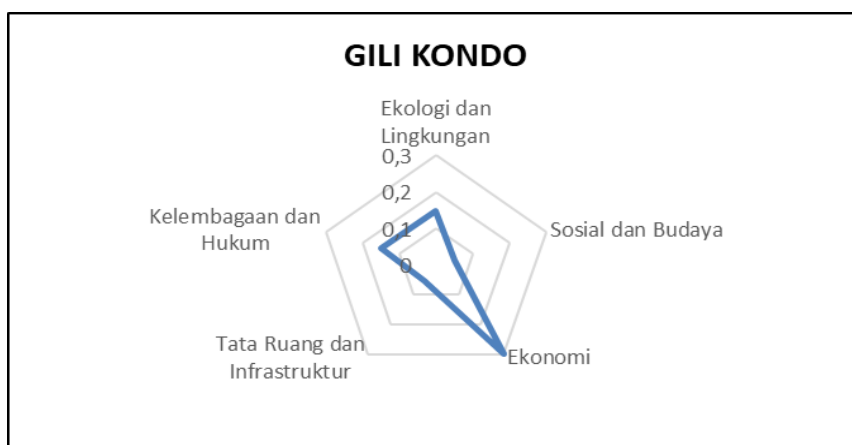
1. Gili Kondo, Kab. Lombok Timur, NTB

Hasil pengolahan data terhadap 5 aspek pengukuran yaitu (a) Aspek Ekologi dan Lingkungan, (b) Aspek Sosial dan Budaya, (c) Aspek Ekonomi, (d) Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur, dan (e) Aspek Kelembagaan dan Hukum, diperoleh hasil sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 14. Hasil Penghitungan Data Terhadap Lima Aspek di Gili Kondo NTB

No.	Aspek	Skor	Bobot	Skor x Bobot
1.	Ekologi dan Lingkungan	0,75	20%	0,15
2.	Sosial dan Budaya	0,25	20%	0,05
3.	Ekonomi	1,50	20%	0,3
4.	Tata Ruang dan Infrastruktur	0,25	20%	0,05
5.	Kelembagaan dan Hukum	0,75	20%	0,15
Jumlah		3,50		0,7
Rata – Rata		0,70		

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai yang diperoleh dari penghitungan IKU 05 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dikelola” pada tahun 2025 di Gili Kondo NTB sebesar 0,70. Merujuk kepada tabel status, nilai, dan kategori dari hasil penghitungan IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada tahun 2025, maka nilai perolehan sebesar 0,70 ($< 0,75$) berada pada status “Terkelola Pra Efektif” dengan kategori “Intervensi Awal dengan upaya menyusun prospektus, IPPK berkaitan dengan aspek ekologi dan lingkungan serta sosial dan budaya”.



Gambar 14. Spider Web Perhitungan 5 Aspek Pengukuran di Gili Kondo

2. Pulau Rote, Kab. Rote Ndao, NTT

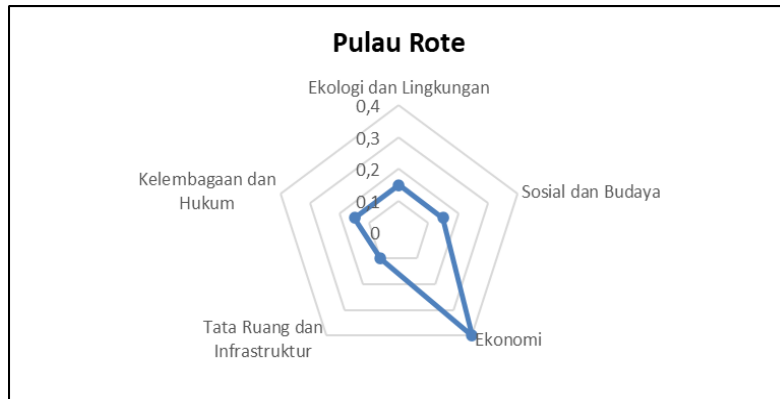
Hasil pengolahan data terhadap 5 aspek pengukuran yaitu (a) Aspek Ekologi dan Lingkungan, (b) Aspek Sosial dan Budaya, (c) Aspek Ekonomi, (d) Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur, dan (e) Aspek Kelembagaan dan Hukum, diperoleh hasil sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Hasil Penghitungan Data Terhadap Lima Aspek di Pulau Rote

No.	Aspek	Skor	Bobot	Skor x Bobot
1.	Ekologi dan Lingkungan	0,75	20%	0,15
2.	Sosial dan Budaya	0,75	20%	0,15
3.	Ekonomi	2,25	20%	0,45
4.	Tata Ruang dan Infrastruktur	0,50	20%	0,10
5.	Kelembagaan dan Hukum	0,75	20%	0,15
Jumlah		5,00		1,00
Rata – Rata		1,00		

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai yang diperoleh dari penghitungan IKU 05 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dikelola” pada tahun 2025 di Pulau Rote NTT sebesar 1,00. Merujuk kepada tabel status, nilai, dan kategori dari hasil penghitungan IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada tahun 2025 maka nilai perolehan sebesar 1,00 ($\geq 0,75$ dan $< 1,15$) berada pada status “Terkelola Efektif” dengan kategori “Penyiapan tata ruang dan infrastruktur, serta kelembagaan dan hukum”.

Hasil penghitungan data terhadap lima aspek pengukuran IKU 05 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dikelola” di Pulau Rote NTT Pada Tahun 2025 digambarkan melalui jaring laba-laba sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 15. Spider Web Perhitungan 5 Aspek Pengukuran di Pulau Rote

3. Kamal Muara, Kota Jakarta Utara, DK Jakarta

Hasil pengolahan data terhadap 5 aspek pengukuran yaitu (a) Aspek Ekologi dan Lingkungan, (b) Aspek Sosial dan Budaya, (c) Aspek Ekonomi, (d) Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur, dan (e) Aspek Kelembagaan dan Hukum, diperoleh hasil sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

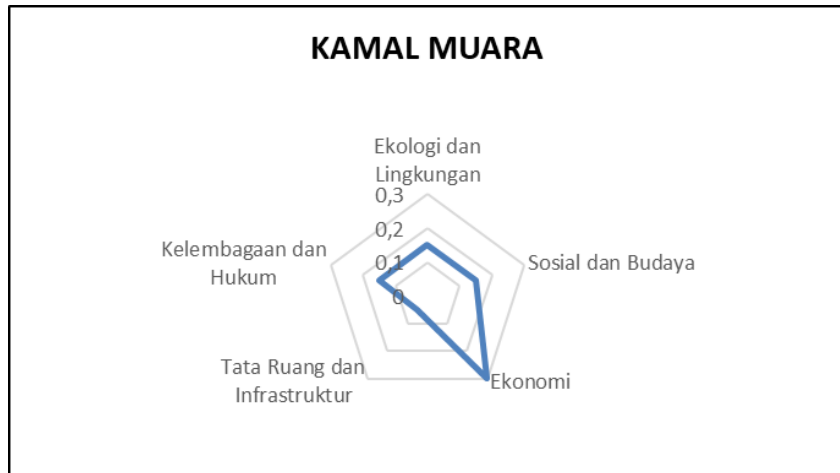
Tabel 16. Hasil Penghitungan Data Terhadap Lima Aspek di Kamal Muara

No.	Aspek	Skor	Bobot	Skor x Bobot
1.	Ekologi dan Lingkungan	0,75	20%	0,15
2.	Sosial dan Budaya	0,75	20%	0,15
3.	Ekonomi	1,75	20%	0,35
4.	Tata Ruang dan Infrastruktur	0,75	20%	0,15
5.	Kelembagaan dan Hukum	0,75	20%	0,15
Jumlah		4,75		0,95
Rata – Rata		0,95		

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai yang diperoleh dari penghitungan IKU 05 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dikelola” pada tahun 2025 di Kamal Muara sebesar 0,95. Merujuk kepada tabel status, nilai, dan kategori dari hasil penghitungan IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” pada tahun 2025 maka nilai perolehan sebesar 0,95 ($\geq 0,75$ dan $< 1,15$) berada pada status “Terkelola Efektif” dengan kategori “Penyiapan tata ruang dan infrastruktur, serta kelembagaan dan hukum”.

Hasil penghitungan data terhadap lima aspek pengukuran IKU 05 “Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dikelola” di Kamal Muara Jakarta Pada Tahun

2025 digambarkan melalui jaring laba-laba sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 16. Spider Web Perhitungan 5 Aspek Pengukuran di Kamal Muara

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” muncul pada tahun 2025 dengan target sebanyak 3 lokasi sedangkan capaian sebanyak 3 lokasi, dan tidak ada IKU ini pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Capaian IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” sebesar 3 lokasi jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPK 2025 – 2029 yakni kumulatif sebesar 14 lokasi persentase capaiannya sebesar 21,42%. Berdasarkan hal tersebut maka, dibutuhkan 11 lokasi lagi agar target Rencana Strategis KKP 2025 – 2029 berhasil tercapai.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Target IKU 05 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola (Kawasan)” sebanyak 3 lokasi dengan capaian sebanyak 3 lokasi sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Tidak ditemukan bandingan dalam standar nasional/target nasional/target internasional sehingga capaian kinerja tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan standar nasional/target nasional/target internasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Data dasar yang digunakan sebagai penentuan lokasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola antara lain Buku Kelautan Perikanan dalam Angka (KPDA)

yang terbitkan KKP pada tahun 2024 secara khusus terkait data potensi desa pesisir 2024 dan sistem informasi berbasis WebGIS (sipulau.big.go.id) yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial.

Pencapaian IKU ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti pihak swasta, perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat serta kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan dalam rangka survey dan pengambilan data dan informasi.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 1) Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
 - 2) Penggunaan alternatif pertemuan atau rapat melalui online dengan memanfaatkan *zoom meeting* serta melalui perpanjangan tangan UPT lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan maupun UPT lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Rapat Pembahasan Gugus Pulau Gili Kondo Kab. Lombok Timur: (1) Gili Kondo, (2) Gili Lampu, (3) Gili Bidara, (4) Gili Pasir, (5) Gili Petagan, Kab. Lombok Timur, Provinsi NTB;
 - 2) Pembahasan NSPK terkait Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan tentang Pedoman Teknis Investasi Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 2 Juni 2025;
 - 3) Sosialisasi dan Survey Pemetaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote;
 - 4) Sosialisasi Pengembangan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Lombok Timur;
 - 5) Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan;
 - 6) Pelatihan dan Lokakarya Pemetaan Lingkungan Laut Menggunakan Penginderaan Jauh untuk Penelitian dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil (*Kiotec Building and Tidung Island*); dan
 - 7) Pembahasan Kajian Akademis Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
- Rencana aksi tahun 2026 antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat (seperti kementerian/lembaga lainnya yang terkait) maupun pemerintah daerah, LSM, perguruan tinggi atau universitas, lembaga swasta, kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mengakselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran program prioritas KKP khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau-pulau kecil, serta melakukan pengumpulan data dan informasi pesisir dan pulau-pulau

kecil yang dikelola terkait dengan aspek ekologi dan lingkungan, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek tata ruang dan infrastruktur, aspek kelembagaan dan hukum, serta aspek terkait lainnya.

3.2.2 SP 2.2 : Meningkatkan Produktivitas Lahan Garam

IKU 6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Sebagaimana mandat perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petambak garam melalui fasilitasi pengembangan usaha pergaraman dalam negeri. Selain itu, pengembangan usaha pergaraman juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang meliputi garam konsumsi dan garam nonkonsumsi, termasuk kebutuhan garam industri.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui Pembangunan atau Revitalisasi Prasarana Usaha Garam untuk masyarakat yang meliputi kegiatan: Survei Calon Lokasi dan Calon Penerima/Pengelola, Sosialisasi dan Diseminasi, Dukungan Penyiapan Lahan, Penyusunan Dokumen Persiapan dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan, Pelaksanaan Jasa Konsultan Manajemen dan Perencanaan DED, Penyusunan Dokumen dan Pemilihan Penyediaan Jasa Konstruksi (tender, e-katalog dan pengadaan langsung), Pembangunan Prasarana Usaha Garam, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi.

Produktivitas lahan garam merupakan pembagian dari produksi garam dengan luas lahan garam. Data produksi garam diperoleh dari hasil pendataan garam yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Petugas pendataan garam di lapangan adalah Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah serta pegawai Dinas Perikanan sebagai pemeriksa. Data luas lahan garam diperoleh dari kegiatan penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam.

Perhitungan Produktivitas lahan garam rakyat dihitung sebagai berikut :

$$produktivitas = \frac{\sum x_i}{n}$$

Keterangan :

xi : Produktivitas kabupaten ke-i (ton/ha)

n : Jumlah kabupaten

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 2.2	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam					
IKU – 6	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)					
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	52,13 Ton/Ha	-	62,83%	83 Ton/Ha	93 Ton/Ha	67,55%

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 hanya mencapai 52,13 ton/ha dengan persentase sebesar 62,83% dimana target yang seharusnya dicapai adalah 83 ton/ha yang secara detail dapat dilihat pada **Lampiran 7**. Rincian capaian pada tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Capaian Produktivitas Lahan Garam Rakyat di tiap Provinsi

Provinsi	Capaian (Ton/Ha)
Aceh	168,76
Jawa Barat	8,07
Jawa Tengah	19,27
Jawa Timur	34,89
Bali	18,48
NTB	18,67
NTT	87,95
Sulawesi Tengah	35,38
Sulawesi Selatan	15,23
Gorontalo	1,74

Ket. : Warna biru provinsi yang berhasil melampaui target tahun 2025

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari total 10 provinsi penghasil garam hanya terdapat dua provinsi yang berhasil melampaui target produktivitas lahan garam rakyat yakni Provinsi Aceh (168,76 Ton/Ha) dan NTT (87,95 Ton/Ha) untuk 8 provinsi lainnya masih jauh dibawah target pada indikator ini.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Belum dapat dilakukan perbandingan kinerja karena capaian IKU tahun 2025 masih dalam tahap pengumpulan dan validasi data. Selain itu, terdapat perubahan indikator pengukuran dan penyesuaian target pada sistem pelaporan berbasis hasil (*result-based management*), sehingga data triwulan sebelumnya belum bersifat *comparable*.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Realisasi produktivitas lahan garam rakyat pada tahun 2025 tercatat sebesar 52,15 ton/ha. Jika dikomparasikan dengan target jangka menengah dalam Rancangan Renstra DJPK 2025–2029, capaian saat ini baru memenuhi 67,55% dari target akhir periode yang diproyeksikan mencapai 93 ton/ha. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan sebesar 40,85 ton/ha antara capaian aktual dan target Renstra, sehingga diperlukan penguatan upaya peningkatan produktivitas melalui intervensi teknologi, perbaikan manajemen lahan, serta dukungan sarana dan prasarana guna mengejar target yang telah ditetapkan dalam periode Renstra DJPK 2025–2029.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, dan Solusi
Capaian pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target pada tahun 2025 hal tersebut dipengaruhi oleh anomali iklim berupa kemarau basah pada lokasi sentra garam yang mengakibatkan berkurangnya hari efektif produksi dan tingginya intensitas hujan pada periode yang seharusnya menjadi puncak produksi garam serta meningkatnya resiko gagal panen pada tambak garam rakyat. Solusi yang diharapkan dapat memaksimalkan capaian pada tahun 2026 adalah melakukan implementasi geomembran, pemanfaatan teknologi di lokasi *pilot project* melalui penggunaan alat SWRO dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas lahan garam.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten di bidangnya
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun *hybrid* serta



- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Intensifikasi
Intensifikasi pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Pati dan Sabu Raijua. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah Revitalisasi Saluran, Pengadaan Pompa, Pengadaan Geisolator, Mesin Pengereng Garam, Pembangunan Gudang Garam Nasional, dan Gudang Garam Rakyat.
 - 2) Pendataan Garam
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dimana dalam rencana aksinya terdapat amanat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendataan Garam Nasional guna menjamin kualitas data yang dihasilkan akurat, mutakhir, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pada tahun 2025 telah dilaksanakan Bimtek Pendataan Garam pada tanggal 3-6 Agustus 2025 serta Bimtek Verifikasi dan Validasi Pendataan Usaha Garam pada tanggal 10-13 September 2025. Telah dilaksanakan juga pendataan produksi dari bulan Januari hingga Desember.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait intensifikasi pergaraman pada tahun 2026 serta pendataan garam sebagai bentuk pendukung pelaksanaan Produktivitas Lahan Garam Rakyat.

3.2.3 SP 2.3 : Meningkatkan Kualitas Produksi Garam

IKU 7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 17 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022. Peraturan ini mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Perpres 17 Tahun 2025 diukur berdasarkan besaran target indikator kinerja yaitu produksi garam dan penyerapan hasil produksi garam. Produksi garam di Indonesia memiliki kualitas yang beragam tergantung kualitas air laut untuk bahan baku, cuaca, teknik/metode produksi, kedisiplinan menerapkan SOP produksi garam, dan sarana atau peralatan produksi yang digunakan. Penentuan garam kualitas satu (K1) berdasarkan pengamatan visual pada lokasi sampling di 10 Provinsi (Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo) yang terdiri dari 57 Kabupaten/Kota.

Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)

Program 2		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
SP 2.3		Meningkatnya Kualitas Produksi Garam				
IKU – 7		Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)				
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	61,07%	-	120%	30%	50%	122,14

- A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025
Target IKU 07 “Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017)” pada tahun 2025 sebesar 30% dengan capaian sebesar 61,07%, capaian ini diperoleh dari rata-rata persentase produksi garam kualitas (K1) dengan total produksi garam tahun 2025 di 10 provinsi penghasil garam yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Capaian Produksi Garam Kualitas Satu (K1) di tiap Provinsi

Provinsi	Capaian (%)
Aceh	83,33
Jawa Barat	29,88
Jawa Tengah	52,84
Jawa Timur	93,04
Bali	50
NTB	46,32
NTT	72,21

Provinsi	Capaian (%)
Sulawesi Tengah	16,35
Sulawesi Selatan	100
Gorontalo	100

Ket. : Warna biru provinsi yang berhasil melampaui target tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian produksi garam K1 pada tahun 2025 dari 10 provinsi garam, 8 provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTB, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo) telah berhasil melampaui target. Namun, terdapat 2 provinsi yang masih belum berhasil melampaui target yakni provinsi Jawa Barat (29,88%) serta Sulawesi Tengah (16,35%).

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian persentase produksi garam K1 tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena merupakan IKU yang baru ada pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Capaian tahun 2025 tercatat sebesar 61,07%, melampaui target Renstra DJPK yang ditetapkan sebesar 50%. Tingkat capaian terhadap target Renstra mencapai 122,14%, yang menunjukkan bahwa kinerja peningkatan kualitas produksi garam rakyat telah melampaui sasaran strategis jangka menengah. Capaian ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas produksi garam rakyat dengan diterapkannya standar mutu, perbaikan proses produksi, serta peningkatan kapasitas petambak garam dalam menghasilkan produk sesuai standar nasional.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja ini meliputi manajemen lahan yang baik, pengelolaan kualitas air secara terukur, manajemen panen yang efektif serta efisien, dan dilakukannya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi para petambak garam agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten di bidangnya
 - 2) Penggunaan media online untuk koordinasi secara daring ataupun *hybrid* serta

- 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Ekstensifikasi.
Ekstensifikasi lahan garam merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi garam melalui perluasan lahan pegaraman baru dengan melakukan pembukaan area potensial yang belum tergarap. Fokus utama ekstensifikasi adalah pengembangan kawasan pegaraman terintegrasi untuk menciptakan skala ekonomi yang memadai melalui pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao. Dengan bertambahnya luas lahan yang dikelola secara modern, total produksi nasional dapat meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan rata-rata produktivitas per hektar
 - 2) Intensifikasi.
Intensifikasi pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Pati dan Sabu Raijua. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah Revitalisasi Saluran, Pengadaan Pompa, Pengadaan Geoisolator, Mesin Pengereng Garam, Pembangunan Gudang Garam Nasional, dan Gudang Garam Rakyat.
 - 3) Pendataan Garam
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dimana dalam rencana aksinya terdapat amanat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendataan Garam Nasional guna menjamin kualitas data yang dihasilkan akurat, mutakhir, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pada tahun 2025 telah dilaksanakan Bimtek Pendataan Garam pada tanggal 3-6 Agustus 2025 serta Bimtek Verifikasi dan Validasi Pendataan Usaha Garam pada tanggal 10-13 September 2025. Telah dilaksanakan juga pendataan produksi dari bulan Januari hingga Desember.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
- Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran terkait intensifikasi serta ekstensifikasi pergaraman pada tahun 2026 serta pendataan garam sebagai bentuk pendukung pelaksanaan Produksi Garam Kualitas Satu (K1).

3.2.4 SP 2.4 : Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan

IKU 8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia (99.093 km), sektor jasa bahari menjadi tulang punggung perekonomian, perdagangan, dan konektivitas nasional. Investasi di bidang jasa bahari tidak hanya

mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Investasi di sektor jasa bahari merupakan peluang strategis mengingat potensi maritim Indonesia yang sangat besar. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti pelayaran, logistik, pengelolaan pelabuhan, wisata bahari, dan jasa pendukung lainnya. Diantara berbagai sektor tersebut, dengan fokus pada beberapa subsector wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut memberikan peluang investasi konkret dan strategis dalam pembangunan nasional berbasis laut. Penilaian tingkat investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan dapat dihitung diantaranya dengan menghitung nilai PNBP yang diterima pada subsector tersebut.

Investasi jasa bahari menawarkan potensi keuntungan jangka panjang dengan dukungan pertumbuhan ekonomi maritim. Namun, investor perlu memitigasi risiko melalui perencanaan matang, adaptasi teknologi, dan sinergi dengan kebijakan pemerintah. Investasi dalam jasa bahari bukan sekadar proyek ekonomi ia adalah fondasi peradaban maritim Indonesia yang modern, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi, investasi di sektor wisata bahari, reklamasi, dan bangunan laut akan menciptakan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus berjalan beriringan untuk menjadikan laut bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini Indonesia.

Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumber Daya Kelautan didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal dalam rangka usaha pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan. Kegiatan produksi garam, pemanfaatan air laut selain energi, pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, pemanfaatan pasir laut dan pemanfaatan/ pengembangan biofarmakologi dan bioteknologi kelautan. Perhitungan dilakukan pada seluruh kegiatan pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan baik sebagai usaha utama maupun sebagai usaha pendukung. Pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan sebagai usaha pendukung merupakan *enabling factor* pada usaha utama sehingga tetap menjadi kunci keberhasilan penanaman modal.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)

Program 2 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 2.4 Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan						
IKU – 8 Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)						
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	Rp18.822 Miliar	-	120	500 Miliar	900 Miliar	2091%

A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025

Berdasarkan Manual IKU, Indikator Kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan didefinisikan sebagai nilai penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh pelaku usaha, masyarakat, atau pemerintah dalam rangka pengembangan kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa bahari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Nilai capaian tahun 2025 sebesar **Rp18.822.471.162.783** yang secara detail dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Indikator kinerja Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Capaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029 sebesar Rp900 Miliar maka, capaian pada tahun ini telah berhasil mencapai target dengan persentase sebesar 2091%.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Belum terdapat Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional pada indikator ini sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2025.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Terdapat beberapa kegiatan yang berhasil dilakukan untuk memperoleh angka Investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan yang melampaui target dengan angka yang tinggi. Di mana, telah dilakukan kegiatan konsultasi publik, sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, dan *coaching clinic* yang diikuti oleh total 449 peserta. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta percepatan proses perizinan oleh pelaku usaha.

Kendala teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain belum optimalnya kepastian pelaku usaha dalam mengajukan dan menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan berusaha, serta adanya perubahan kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk asistensi dan *coaching clinic* secara terukur, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi verifikator dan petugas pelayanan dan meningkatkan sumberdaya dan melengkapi sarana dan prasarana utama pelayanan perizinan.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 1) Penggunaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan kompeten dibidangnya
 - 2) Penggunaan media online atau memanfaatkan *zoom meeting* serta
 - 3) Melakukan pendelegasian bantuan dengan perpanjangan tangan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- G. Kegiatan Pendukung
 - 1) Bimtek dan *Coaching Clinic* Perizinan Berusaha Jasa Bahari;
 - 2) Asistensi Teknis Perizinan Berusaha di *Coastal Area* Balikpapan;
 - 3) Pendampingan Teknis Perizinan Berusaha Jasa Bahari di Pulau Maratua;
 - 4) Asistensi Perizinan Berusaha Reklamasi dan Wisata Bahari; dan
 - 5) Forum Konsultasi Publik Lingkup Direktorat Jasa Bahari.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
 - 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran investasi pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan.
 - 2) Sosialisasi terkait adanya regulasi baru
 - 3) Monitoring terhadap perizinan yang telah terbit.

3.3 Program 3 : Dukungan Manajemen

Dalam rangka mencapai Program Dukungan Manajemen dengan Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai).

3.3.1 SP 3.1 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan

IKU 9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arah Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)

Program 2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
SP 2.4	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan					
IKU – 8	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)					
Capaian Tahun Sebelumnya	Tahun 2025				Renstra DJPK 2025-2029	
2024	Capaian 2025	Kenaikan terhadap Tw III 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	88,18	-	102,53%	86	88	100,2%

- A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025
Periode pengukuran Capaian IK Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dilakukan secara tahunan, capaian Tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan nilai 88.18 berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 87/SS.3/OT.720/I/2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024
Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 karena, indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 – 2029
Capaian Kinerja Tahun 2025 yaitu 88,18 jika dibandingkan dengan target Renstra DJPK Tahun 2025 – 2029 sebesar 88 maka capaian pada tahun 2025 telah melampaui target.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 tidak terdapat target nasional atau target internasional sehingga tidak dapat dibandingkan. Namun berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Nomor 140/SJ.3/OT.720/I/2026 perihal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 capaian indikator ini dapat dibandingkan dengan unit Eselon I lain lingkup KKP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 lingkup KKP

No.	Unit Organisasi Eselon I	Nilai Capaian
1.	Sekretariat Jenderal	90,62
2.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	88.96
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	88.18
4.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	88.60
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	89.16
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	90.84
7.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	91.76
8.	Inspektorat Jenderal	88.69
9.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	90.78
10.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	89.12

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 Analisis Keberhasilan dari Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 dengan nilai 88.18 telah melebihi target Tahunan yaitu 86. Hal ini didukung oleh koordinasi antar Unit Kerja selaku pengampu masing-masing substansi yang ada pada Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian IK Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam pelaksanaan dan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
- G. Kegiatan Pendukung
- 1) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2025
 - 2) Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025
 - 3) Penetapan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025
 - 4) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025.
- H. Rencana Aksi Tahun 2026
 Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNPB (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, dan 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Namun, pada bulan april 2025 terjadi perubahan organisasi dimana DJPKRL bereformasi menjadi dua Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) sehingga Pagu DJPK berubah menjadi Rp.573.248.391.000. Realisasi anggaran DJPK Tahun 2025 adalah Rp1.308.005.113.377 dari total pagu Rp1.427.218.648.000 dengan persentase 91,66%. Adapun secara detail realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

No	Nama Program	Nomor	Pagu	Realisasi	%
1	Lingkungan hidup	1	355.648.398.000	196.638.324.516	55,29
		2	2.785.830.000	903.363.182	32,43
			358.434.228.000	197.541.687.698	55,11
2	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1	888.416.617.000	826.707.564.367	93,05
		2	28.133.883.000	18.799.580.994	66,82
		3	117.092.817.000	92.541.474.417	79,03
			1.033.643.317.000	938.048.619.778	90,75
3	Dukungan Manajemen	1	176.069.511.000	166.261.612.556	94,43
Total			1.568.147.056.000	1.301.851.920.032	83,02

Pada Tahun 2025 terdapat 6 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal DJPK sebesar Rp573.248.391.000 dengan Rincian Rupiah Murni sebesar Rp216.064.899.000, Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp283.744.000.000, PNPB sebesar Rp73.439.492.000. Adapun secara detail proses revisi pagu anggaran DJPK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25. Revisi pagu anggaran DJPK

Revisi ke-	Keterangan Revisi	Pagu Semula (Rp.000)	Pagu Menjadi/Efektif (Rp.000)
1	Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025	586.807.674	400.320.763

2	Pergeseran Anggaran ke Ditjen PRL	586.807.674	396.661.480
3	Pembukaan Blokir Anggaran PNB	583.148.391	424.066.658
4	Penambahan ABT Garam	1.426.623.457	1.267.541.724
5	Penambahan Anggaran PNB	1.580.114.349	1.403.485.344
6	Relaksasi dan Program Belanja Pegawai	1.568.147.056	1.427.218.648

Revisi pertama (Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025) pagu sebesar Rp 586.807.674.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp186.486.911.000 menjadi Rp400.320.763.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK). Revisi kedua (Revisi Anggaran terkait Pergeseran Anggaran ke Ditjen Penataan Ruang Laut TA 2025) pagu sebesar Rp 586.807.674.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp186.486.911.000 menjadi Rp396.661.480.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK). Revisi ketiga (Revisi Anggaran dalam Rangka Pembukaan Blokir Anggaran PNB TA 2025) pagu sebesar Rp 583.148.391.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp159.081.733.000 menjadi Rp424.066.658.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK). Revisi keempat (Revisi DIPA Penambahan Anggaran ABT Garam) Pagu Sebesar Rp1.426.623.457.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp159.081.733.000 menjadi Rp1.267.541.724.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK). Revisi kelima (Revisi DIPA Penambahan Anggaran PNB) Pagu Sebesar Rp1.580.114.349.000 termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp176.629.005.000 menjadi Rp1.403.485.344.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK). Revisi keenam (Revisi Relaksasi dan Program Belanja Pegawai) termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp140.928.408.000 menjadi Rp1.427.218.648.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPK).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPK Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPK terdiri atas 9 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2025 adalah sebesar **105,5% (Baik)**. Dari 9 indikator kinerja tersebut, 8 indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target namun, terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni indikator kinerja produktivitas lahan garam rakyat dengan capaian 52,15 ton/ha atau 62,83% dari target. Rincian capaian disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 26. Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Kinerjaku
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil yang efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5	18,5	100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Lokasi)	420	420	100%
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Pesisir dan/atau Pulau – Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2	3	120%
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih kembali	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	2	8	120%
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3	3	100%
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83	52,13	62,81%
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2027) (%)	30	61,07	120%

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target 2025	Capaian Tahun 2025	% Realisasi Kinerjaku
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp.Milyar)	500	18.822	120%
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86	88,18	102,53%

Ket. : (1) 120% adalah persentase maksimal pada SAPK; (2) Tabel warna biru berarti melampaui target, hijau berarti mencapai target, merah berarti tidak mencapai target

Pada Tahun 2025 terdapat 6 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal DJPK sebesar Rp573.248.391.000 dengan Rincian Rupiah Murni sebesar Rp216.064.899.000, Pinjaman Hibah Luar Negeri sebesar Rp283.744.000.000, PNPB sebesar Rp73.439.492.000. Adapun secara detail proses revisi pagu anggaran DJPK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Revisi Pagu Anggaran DJPK

Revisi ke-	Keterangan Revisi	Pagu Semula (Rp.000)	Pagu Menjadi/Efektif (Rp.000)
1	Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025	586.807.674	400.320.763
2	Pergeseran Anggaran ke Ditjen PRL	586.807.674	396.661.480
3	Pembukaan Blokir Anggaran PNPB	583.148.391	424.066.658
4	Penambahan ABT Garam	1.426.623.457	1.267.541.724
5	Penambahan Anggaran PNPB	1.580.114.349	1.403.485.344
6	Relaksasi dan Program Belanja Pegawai	1.568.147.056	1.427.218.648

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPK terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Kebijakan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target program; (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran pasca perkembangan organisasi dalam proses penyusunan dan penyempurnaan; dan (3) Perubahan struktur organisasi yang diikuti dengan penetapan kinerja baru menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kinerja.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Membuat timeline pelaksanaan kegiatan agar penyelesaiannya tepat waktu.

2. Percepatan penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran DJPK.
3. Penguatan pemahaman indikator kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai lingkup DJPK.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Tahun 2025 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Melakukan revisi DIPA dengan membuka alokasi yang diblokir khususnya dengan kode blokir 2	Telah dilakukan Revisi DIPA berdasarkan Pengesahan Revisi DIPA Satker Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (622145) Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: S-4483/WPB.12/2025 tanggal 1 Agustus 2025.
2.	Pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dan diselesaikan pada tahun 2025	Telah dilakukan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diumumkan pada aplikasi SIRUP pada triwulan III sebesar 100% berdasarkan Nota Dinas Nomor: 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tanggal 8 Oktober perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025.
3.	Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran DJPK tahun 2025 – 2029.	Telah disusun matriks kinerja pendanaan pada Rencana Strategis DJPK Tahun 2025 dan pengesahan dokumen perencanaan kinerja DJPK Tahun 2025

Tabel 29. Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Penyusunan jadwal rinci pelaksanaan kegiatan dan pemantauan serta evaluasi secara berkala.	Telah dilakukan penyusunan jadwal rinci pelaksanaan kegiatan yang memuat tahapan, waktu, penanggung jawab, serta indikator capaian setiap kegiatan. Serta dilakukan pemantauan dan evaluasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		secara berkala untuk menilai kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.
2.	Peningkatan koordinasi dan komunikasi serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan efisiensi pengelolaan kinerja.	Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi antarunit kerja melalui forum koordinasi rutin serta penetapan mekanisme komunikasi yang lebih jelas dan terstruktur. Selain itu, dilakukan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, antara lain melalui penggunaan aplikasi <i>kinerjaku</i> untuk mempercepat proses perencanaan, pemantauan, dan pelaporan kinerja. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta efektivitas pengelolaan kinerja secara keseluruhan.
3.	Penyesuaian target kinerja sebagai dampak efisiensi anggaran berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025.	Telah disusun dokumen kinerja revisi yang disahkan pada bulan Desember 2025. Dokumen tersebut telah memuat perubahan target indikator serta anggaran pada tahun 2025.

LAMPIRAN

**LAUT
SEHAT
KONSERVASI
KUAT
INDONESIA
SEJAHTERA**

**20
25**



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Pengesahan Juni 2025)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1.	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2.	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3.	Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	2
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6.	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7.	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8.	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Miliar)	500
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.033.643.317.000
	a. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
	b. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	
	c. Pengelolaan Jasa Bahari	
2	PROGRAM: Kualitas Lingkungan Hidup	358.434.228.000
	a. Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	
	b. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
3	PROGRAM : Dukungan Manajemen	176.069.511.000
	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025		1.568.147.056.000

Jakarta, 2 Desember 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Pengesahan Desember 2025)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Koswara**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	1. Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	18,5
2.	Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	2. Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	420
3.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	3. Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	2
4.	Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	1
5.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5. Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	3
6.	Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	6. Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	83
7.	Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	7. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (SNI 4435:2017) (%)	30
8.	Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	8. Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	500
9.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	9. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.381.938.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	29.335.000.000
3	Pengelolaan Jasa Bahari	8.954.491.000
PROGRAM : Kualitas Lingkungan Hidup		
1	Pengelolaan Konservasi Ekosistem, Spesies dan Genetik di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Pulau - Pulau Kecil	307.433.288.000
2	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.785.830.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan	200.357.844.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025		573.248.391.000

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan



Ditandatangani
Secara Elektronik

A. Koswara

Lampiran 3. Kawasan Konservasi di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi Tahun 2025

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA	Luas (Ha)
	Kawasan Konservasi Nasional			5.355.406,84
1.	Pulau Pieh	90,61	Berkelanjutan	39.920,00
2.	Kepulauan Anambas	86,74	Berkelanjutan	1.265.401,51
3.	Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan	92,51	Berkelanjutan	2.268,59
4.	TNP Laut Sawu	93,00	Berkelanjutan	3.355.352,82
5.	Kapoposang	90,98	Berkelanjutan	49.923,55
6.	Kepulauan Aru Tenggara	81,03	Optimum	94.874,14
7.	Laut Banda	87,60	Berkelanjutan	2.501,98
8.	Pulau Padaido	90,30	Berkelanjutan	177.411,35
9.	Kepulauan Raja Ampat	88,51	Berkelanjutan	57.875,75
10.	Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	89,06	Berkelanjutan	267.209,16
11.	Mahakam Wilayah Hulu	59,10	Optimum	42.667,99
	Kawasan Konservasi Daerah			13.242.635,30
	Aceh			
12.	Suaka Alam Perairan Pesisir Timur Pulau Weh	65,87	Optimum	3.207,98
13.	Taman Pesisir Aceh Jaya	50,44	Optimum	50.105,18
14.	Taman Pesisir Aceh Tamiang	34,77	Minimum	2.750,71
15.	Suaka Alam Perairan Aceh Besar	63,66	Optimum	29.615,63
16.	Suaka Alam Perairan P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	67,29	Optimum	44.404,10
17.	Suaka Alam Perairan Aceh Barat Daya	34,55	Minimum	16.017,45

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA	Luas (Ha)
18.	Suaka Alam Perairan Aceh Selatan	42,48	Minimum	3.590,34
	Sumatera Utara			
19.	Taman Wisata Perairan Sawo Lahewa	52,37	Optimum	29.130,47
20.	Taman Pulau Kecil Tapanuli Tengah	38,33	Minimum	84.429,07
21.	Taman Pulau Kecil Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	42,89	Minimum	44.939,22
22.	Pulau Berhala	23,71	Minimum	3.762,62
	Sumatera Barat			
23.	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	67,73	Optimum	129.566,00
24.	Pesisir Selatan	57,57	Optimum	175.583,56
25.	Kota Padang	52,20	Optimum	2.188,70
26.	Kota Pariaman	83,22	Optimum	11.778,22
27.	Batang Gasan Padang Pariaman	74,48	Optimum	735,93
28.	Pasaman Barat	64,27	Optimum	6.122,14
29.	Agam	18,73	Minimum	6.535,98
	Riau			
30.	Kepulauan Aruah	63,36	Optimum	18.536,10
31.	Indragiri Hilir	59,44	Optimum	126.097,64
	Kepulauan Riau			
32.	Timur Pulau Bintan	68,11	Optimum	138.561,42
33.	Perairan di Wilayah Bintan II	17,91	Minimum	843.609,30
	Kepulauan Bangka Belitung			
34.	Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang	39,83	Minimum	124.320,70
35.	Taman Wisata Perairan Belitung	41,39	Minimum	391.820,23
36.	Tuing	45,97	Minimum	7.372,50

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA	Luas (Ha)
37.	Ketugar Perlang	42,39	Minimum	11.358,29
38.	Pulau Lepar dan Pulau Pongok	37,79	Minimum	92.519,25
	Lampung			
39.	Taman Wisata Perairan Teluk Kiluan	49,88	Minimum	72.211,68
40.	Way Kambas	77,89	Optimum	60.420,98
41.	Ngambur	39,82	Minimum	4.584,87
42.	Pulau Batang dan Pulau Segama	17,33	Minimum	14.878,71
	Jawa Barat			
43.	Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan	90,71	Berkelanjutan	2.706,09
44.	Pulau Biawak	37,04	Minimum	54.847,49
45.	Pangandaran	67,73	Optimum	38.810,15
	Banten			
46.	Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth	51,74	Optimum	99,94
	Jawa Tengah			
47.	Taman Pesisir Ujungnegoro Roban	52,53	Optimum	4.015,20
48.	Karang Jeruk	59,35	Optimum	238,16
49.	Karang Jahe	51,96	Optimum	33,65
50.	Pulau Panjang	52,34	Optimum	494,25
51.	Perairan di Wilayah Betahlawang	28,84	Minimum	244,88
	DIY			
52.	Pantai Selatan Bantul	61,62	Optimum	695,89
	Jawa Timur			
53.	Gili Ketapang	66,07	Optimum	476,78
	Bali			
54.	Taman Wisata Perairan Nusa Penida	76,79	Optimum	20.057,00
55.	Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa	17,09	Minimum	1.243,41
56.	Buleleng	30,33	Minimum	18.060,18

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA	Luas (Ha)
57.	Karangasem	30,56	Minimum	5.478,41
	Nusa Tenggara Barat			
58.	Taman Wisata Perairan Gili Sulat dan Gili Lawang	78,36	Optimum	10.000,00
59.	Taman Wisata Perairan Gita Nada	74,32	Optimum	21.132,82
60.	Taman Wisata Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali	67,87	Optimum	32.692,90
61.	Taman Wisata Perairan Gili Banta	46,01	Minimum	40.276,54
62.	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi	62,19	Optimum	22.257,45
63.	Gili Balu	68,80	Optimum	5.845,67
64.	Pulau Panjang	54,71	Optimum	22.185,14
65.	Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong	47,74	Minimum	1.955,55
66.	Pulau Lipan dan Pulau Rakit	65,24	Optimum	26.670,80
	Nusa Tenggara Timur			
67.	Alor	94,21	Berkelanjutan	277.072,61
68.	Flores Timur	55,52	Optimum	150.069,35
69.	Lembata	32,20	Minimum	199.688,38
70.	Sikka	37,46	Minimum	75.133,46
	Kalimantan Barat			
71.	Taman Wisata Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara	26,88	Minimum	115.723,63
72.	Taman Pulau Kecil Pulau Randayan	33,84	Minimum	61.654,59
73.	Taman Pulau Kecil Kendawangan	28,92	Minimum	164.595,74
74.	Taman Pesisir Kubu Raya	43,08	Minimum	134.409,14
75.	Taman Pesisir Paloh	28,49	Minimum	168.291,06
	Kalimantan Tengah			

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA	Luas (Ha)
76.	Gosong Senggora Sepagar	67,90	Optimum	61.362,24
	Kalimantan Selatan			
77.	Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	65,31	Optimum	179.659,89
	Kalimantan Timur			
78.	Kepulauan Derawan	80,07	Optimum	285.548,95
79.	Bontang	45,52	Minimum	3.499,53
	Kalimantan Utara			
80.	Binusan dan Pulau Sinelak	31,27	Minimum	900,11
81.	Tanjung Palas Timur	31,64	Minimum	24.581,97
	Sulawesi Utara			
82.	Tatoareng	61,51	Optimum	164.251,94
83.	Minahasa Utara	54,05	Optimum	25.531,26
84.	Sitaro	56,00	Optimum	39.931,20
	Sulawesi Tengah			
85.	Doboto	47,42	Minimum	60.042,72
86.	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	52,18	Optimum	128.689,86
87.	Morowali, Morowali Utara	72,69	Optimum	292.910,12
88.	Banggai Dalaka	62,08	Optimum	856.649,13
	Sulawesi Selatan			
89.	Liukang Tupabbiring	38,53	Minimum	63.407,23
90.	Liukang Tangaya	44,35	Minimum	505.862,34
	Gorontalo			
91.	Teluk Gorontalo	44,25	Minimum	76.580,48
	Sulawesi Barat			
92.	Kepulauan Balabakakang	21,34	Minimum	184.469,31
	Sulawesi Tenggara			
93.	Teluk Moramo	52,79	Optimum	21.902,34
94.	Pulau Wawonii	38,24	Minimum	27.044,99

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA	Luas (Ha)
	Maluku			
95.	Pulau Kei Kecil	74,32	Optimum	150.000,00
96.	P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	61,29	Optimum	9.900,87
97.	Kepulauan Lease	70,18	Optimum	67.484,19
98.	Pulau Ay dan Pulau Rhun	66,69	Optimum	61.178,53
99.	Pulau Buano	58,79	Optimum	31.886,86
100.	Seram Utara dan Seram Utara Barat	60,54	Optimum	106.710,86
101.	Kepulauan Tanimbar	44,02	Minimum	312.181,70
102.	Damer	34,63	Minimum	297.143,91
103.	Mdona Hiera, Lakor, Moa, dan Letti	30,77	Minimum	371.722,43
104.	Kepulauan Romang	33,47	Minimum	274.845,74
105.	Kepulauan Babar	37,03	Minimum	370.527,09
	Maluku Utara			
106.	Pulau Mare	60,82	Optimum	7.060,87
107.	Pulau Rao-Tanjung Dehegila	68,35	Optimum	65.892,42
108.	Kepulauan Sula	34,76	Minimum	120.723,88
109.	Kepulauan Widi	59,76	Optimum	315.117,92
110.	Kepulauan Guraici	61,53	Optimum	91.538,99
111.	Pulau Makian dan Pulau Moti	55,46	Optimum	67.349,00
	Papua			
112.	Biak Numfor	13,79	Minimum	49.062,44
	Papua Barat			
113.	Kaimana	52,11	Optimum	499.804,13
114.	Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	66,00	Optimum	346.807,87
	Papua Selatan			
115.	Pulau Kolepom	13,02	Minimum	356.337,90
	Papua Barat Daya			
116.	Kepulauan Raja Ampat	86,46	Berkelanjutan	1.348.459,47

No.	Kawasan Konservasi	Nilai EVIKA 2025	Status EVIKA	Luas (Ha)
117.	Jeen Womom	46,38	Minimum	32.250,86
118.	Seribu Satu Sungai Teoenebikia	8,59	Minimum	349.133,13
119.	Misool Utara	67,56	Optimum	308.777,35

Lampiran 4. Jenis Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES yang dikelola pada tahun 2025

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
1	<i>Alopias pelagicus</i>		Apendiks II
2	<i>Alopias superciliosus</i>		Apendiks II
3	<i>Alopias vulpinus</i>		Apendiks II
4	<i>Carcharias taurus</i>	Hiu Anjing	Apendiks II
5	<i>Carcharhinus acronotus</i>	Blacknose shark	Apendiks II
6	<i>Carcharhinus albimarginatus</i>	Hiu Lanjaman Sirip Putih	Apendiks II
7	<i>Carcharhinus altimus</i>		Apendiks II
8	<i>Carcharhinus amblyrhinchoides</i>	Hiu Lonjor	Apendiks II
9	<i>Carcharhinus amblyrhynchos</i>	Hiu Mangiwang	Apendiks II
10	<i>Carcharhinus amboinensis</i>		Apendiks II
11	<i>Carcharhinus borneensis</i>	Borneo shark	Apendiks II
12	<i>Carcharhinus brachyurus</i>		Apendiks II
13	<i>Carcharhinus brevipinna</i>	Nervous Shark	Apendiks II
14	<i>Carcharhinus cautus</i>		Apendiks II
15	<i>Carcharhinus cerdale</i>	Pacific smalltail shark	Apendiks II
16	<i>Carcharhinus coatesi</i>		Apendiks II
17	<i>Carcharhinus dussumieri</i>	Whitecheek shark, Hiu Tokek Bali	Apendiks II
18	<i>Carcharhinus falciformis</i>		Apendiks II
19	<i>Carcharhinus fitzroyensis</i>		Apendiks II
20	<i>Carcharhinus galapagensis</i>		Apendiks II
21	<i>Carcharhinus hemiodon</i>	Pondicherry shark	Apendiks II
22	<i>Carcharhinus humani</i>		Apendiks II
23	<i>Carcharhinus isodon</i>		Apendiks II
24	<i>Carcharhinus leiodon</i>	Smoothtooth blacktip shark	Apendiks II

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
25	<i>Carcharhinus leucas</i>	Hiu Kerbau	Apendiks II
26	<i>Carcharhinus limbatus</i>	Hiu Kejen	Apendiks II
27	<i>Carcharhinus longimanus</i>		Apendiks II
28	<i>Carcharhinus macroti</i>	Hardnose Shark	Apendiks II
29	<i>Carcharhinus melanopterus</i>	Hiu Karang Sirip Hitam	Apendiks II
30	<i>Carcharhinus obscurus</i>	Hiu Merak Bulu	Apendiks II
31	<i>Carcharhinus obsoletus</i>	Lost shark	Apendiks II
32	<i>Carcharhinus perezi</i>	Caribbean reef shark	Apendiks II
33	<i>Carcharhinus plumbeus</i>	Sandbar shark, Hiu Teteri	Apendiks II
34	<i>Carcharhinus porosus</i>	Smalltail shark	Apendiks II
35	<i>Carcharhinus sealei</i>	Hiu Lanjaman	Apendiks II
36	<i>Carcharhinus signatus</i>	Night Shark, Hiu Hitam	Apendiks II
37	<i>Carcharhinus sorrah</i>	Hiu Mungsing	Apendiks II
38	<i>Carcharhinus taurus</i>		Apendiks II
39	<i>Carcharhinus tilstoni</i>	Australian Blacktip Shark	Apendiks II
40	<i>Carcharhinus tjutjot</i>	Indonesian Whaler Shark	Apendiks II
41	<i>Glaucostegus thouin</i>	Pari Kikir	Apendiks II
42	<i>Glaucostegus typus</i>	Pari Kikir	Apendiks II
43	<i>Glyphis gangeticus</i>	Ganges shark	Apendiks II
44	<i>Hippocampus spp</i>		Apendiks II
45	<i>Holacanthus clarionensis</i>	Clarion Angelfish	Apendiks II
46	<i>Hypancistrus zebra</i>	Pleco Zebra	Apendiks II
47	<i>Isurus oxyrinchus</i>		Apendiks II
48	<i>Isurus paucus</i>		Apendiks II
49	<i>Lamiopsis temminckii</i>	Broadfin shark	Apendiks II
50	<i>Lamiopsis tephrodes</i>	Borneo broadfin shark	Apendiks II
51	<i>Lamna nasus</i>	Hiu Mackarel	Apendiks II
52	<i>Loxodon macrorhinus</i>	Hiu Lonjor Panjang	Apendiks II
53	<i>Mustelus antarticus.</i>		Apendiks II

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
54	<i>Negaprion brevirostris</i>		Apendiks II
55	<i>Neoceratodus forsteri</i>	Australian lungfish	Apendiks II
56	<i>Potamotrygon albimaculata</i>	Pari Sungai Bercak Putih	Apendiks II
57	<i>Potamotrygon henlei</i>	Pari Air Tawar	Apendiks II
58	<i>Potamotrygon jabuti</i>		Apendiks II
59	<i>Potamotrygon leopoldi</i>		Apendiks II
60	<i>Potamotrygon marquesi</i>		Apendiks II
61	<i>Potamotrygon signata</i>		Apendiks II
62	<i>Potamotrygon wallacei</i>		Apendiks II
63	<i>Prionace glauca</i>	Hiu Karet	Apendiks II
64	<i>Rhina ancylostoma</i>	Pari Kupu-kupu/ Pari Barong	Apendiks II
65	<i>Rhinobatos jimbaranensis</i>	<i>Jimbaran Guitarfish, Pari Kikir</i>	Apendiks II
66	<i>Rhinobatos panggali</i>	Pari Tapis, Pari Gitar	Apendiks II
67	<i>Rhizoprionodon acutus</i>	Hiu Lancip	Apendiks II
68	<i>Rhizoprionodon macrorhynchus</i>	Hiu Moncong Tajam	Apendiks II
69	<i>Rhizoprionodon taylori</i>	Hiu Hidung Tajam	Apendiks II
70	<i>Rhizoprionodon oligolinx</i>	Hiu Pilus, Hiu Pisang	Apendiks II
71	<i>Rhynchobatus australiae</i>	Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	Apendiks II
72	<i>Rhynchobatus palpebratus</i>		Apendiks II
73	<i>Rhynchobatus springeri</i>	Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	Apendiks II
74	<i>Rhynchobatus laevis</i>	Pari Kekeh/ Pari Liong Bun/ Pari Lontar	Apendiks II
75	<i>Sphyrna lewini</i>	Hiu Martil	Apendiks II
76	<i>Sphyrna mokarran</i>	Hiu Martil	Apendiks II
77	<i>Sphyrna zygaena</i>	Hiu Martil	Apendiks II
78	<i>Triaenodon obesus</i>	Hiu Coklat	Apendiks II
79	<i>Paratrygon aiareba</i>	Pari Discus	Apendiks III

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
80	<i>Potamotrygon magdalenae</i>		Apendiks III
81	<i>Potamotrygon motoro</i>		Apendiks III
82	<i>Potamotrygon orbignyi</i>		Apendiks III
83	<i>Potamotrygon schroederi</i>		Apendiks III
84	<i>Potamotrygon scobina</i>		Apendiks III
85	<i>Potamotrygon yepezi</i>		Apendiks III
86	<i>Balantiocheilos melanopterus</i>	ikan balashark	Dilindungi Penuh
87	<i>Barbodes microps</i>	wader goa	Dilindungi Penuh
88	<i>Chitala borneensis</i>	belida borneo	Dilindungi Penuh
89	<i>Chitala hypselonotus</i>	belida sumatra	Dilindungi Penuh
91	<i>Chitala lopis</i>	belida lopis	Dilindungi Penuh
92	<i>Fluvitrygon oxyrhynchus</i>	Pari Sungai Tutul	Dilindungi Penuh
93	<i>Fluvitrygon signifier</i>	Pari Sungai Pinggir Putih	Dilindungi Penuh
94	<i>Hemiscyllium spp</i>	Hiu Berjalan	Dilindungi Penuh
95	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	selusur maninjau	Dilindungi Penuh
96	<i>Isis sp.</i>	Bambu Laut	Dilindungi Penuh
97	<i>Neolissochilus thienemanni</i>	ikan batak	Dilindungi Penuh
98	<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>	pasa	Dilindungi Penuh
99	<i>Urogymnus polylepis</i>	Pari Sungai Raksasa	Dilindungi Penuh
100	<i>Urolophus kaianus</i>	pari kai	Dilindungi Penuh
101	<i>Anguilla spp.</i>	Sidat	Dilindungi Terbatas
102	<i>Notopterus notopterus</i>	belida jawa	Dilindungi terbatas
103	<i>Pterapogon kauderni</i>	Capungan Banggai	Dilindungi Terbatas
104	<i>Scleropages jardinii</i>	siluk irian	Dilindungi terbatas
105	<i>Tenualosa illisha</i>	Ikan Terubuk	Dilindungi Terbatas
106	<i>Tenualosa macrura</i>	Ikan Terubuk	Dilindungi Terbatas
107	<i>Actinodendron plumosum</i>		Look alike species
108	<i>Actinodiscus sp.</i>		Look alike species
109	<i>Alcyonium spp.</i>	Tanganan	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
110	<i>Amplexidiscus spp.</i>	Jamur Mangkok	Look alike species
111	<i>Anthelia sp.</i>	Awut Campur	Look alike species
112	<i>Briareum spp.</i>	Akar Bahar	Look alike species
113	<i>Briareum stechei</i>	Akar Bahar Kelapa Hijau	Look alike species
114	<i>Capnella sp.</i>	Karang Muda Kenya	Look alike species
115	<i>Cerianthus membranaceus</i>	Anemon Seriantus	Look alike species
116	<i>Cerianthus mortenseni</i>	Anemon Sariantus Warna	Look alike species
117	<i>Cerianthus orientalis</i>	Anemon Seriantus	Look alike species
118	<i>Cerianthus sp.</i>	Anemon Seriantus Hitam, Ijo Neon, Orens, Ungu	Look alike species
119	<i>Cervera sp</i>	Polip Hujan	Look alike species
120	<i>Cespitularia spp.</i>	Awut Pipa	Look alike species
121	<i>Chlorodesmis spp.</i>	Lumut Lumut	Look alike species
122	<i>Cladiella australis</i>		Look alike species
123	<i>Cladiella sp.</i>	Karang Muda Bulu	Look alike species
124	<i>Clavularia spp.</i>	Polip Cengkeh Hijau	Look alike species
125	<i>Collospongia auris</i>	Spon Biru Datar	Look alike species
126	<i>Condylastis gigantea</i>		Look alike species
127	<i>Cornularia spp.</i>		Look alike species
128	<i>Cryptodendrum adhaesivum</i>	Anemon Perekat	Look alike species
129	<i>Cryptodendrum spp.</i>	Anemon Pizza	Look alike species
130	<i>Dendronephthya spp.</i>	Karang Muda Seroja Merah	Look alike species
131	<i>Discosoma spp.</i>	Jamur	Look alike species
132	<i>Efflatounaria sp.</i>	Awut Palsa Palsu	Look alike species
133	<i>Ellisella spp.</i>		Look alike species
134	<i>Entacmaea spp</i>	Anemon Jagung	Look alike species
135	<i>Epicystis crucifer</i>		Look alike species
136	<i>Epizoanthus spp.</i>	Polip Kayu	Look alike species
137	<i>Eriathus sp.</i>		Look alike species
138	<i>Girostorna spp.</i>		Look alike species
139	<i>Gorgonia sp.</i>		Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
140	<i>Gorgonia ventalina</i>		Look alike species
141	<i>Haliclona fulva</i>	Spon Kuning	Look alike species
142	<i>Haliclona spp.</i>	Sponge Biru	Look alike species
143	<i>Heliochondria spp.</i>	Spon Kuning	Look alike species
144	<i>Heteractis spp.</i>	Anemon Badut, Anemon Pakis	Look alike species
145	<i>Heterodactyla hemprichii</i>	Anemon Rambut	Look alike species
146	<i>Heteroxenia elizabethae</i>	Awut Pipa Bulat	Look alike species
147	<i>Heteroxenia spp.</i>		Look alike species
148	<i>Klyxum sp.</i>	Karang Muda Colt	Look alike species
149	<i>Knopia sp.</i>		Look alike species
150	<i>Lemnalia sp.</i>	Karang Muda Pohon	Look alike species
151	<i>Litophyton arboreum</i>	Seroja Coklat	Look alike species
152	<i>Litophyton sp.</i>	Karang Muda Air	Look alike species
153	<i>Lobophytum pauciflorum</i>	Karang Muda Mawar Kecil Hijau	Look alike species
154	<i>Lobophytum sp</i>	Karang Muda Mawar	Look alike species
155	<i>Macroactyla doreensis</i>	Anemon Model, Pantat Merah/Merah Violet/Merah Kuning, Pink	Look alike species
156	<i>Macroactyla spp.</i>	Anemon Model	Look alike species
157	<i>Menella spp.</i>		Look alike species
158	<i>Neozoanthus sp.</i>	Polip Kayu	Look alike species
159	<i>Nephtea chabroliei</i>		Look alike species
160	<i>Nephtea sp.</i>	Karang Muda Cemara	Look alike species
161	<i>Pachyclavularia sp.</i>		Look alike species
162	<i>Pachyclavularia violacea</i>	Polip Bintang	Look alike species
163	<i>Palythoa spp.</i>	Polip Kancing	Look alike species
164	<i>Pamzoanthus spp.</i>		Look alike species
165	<i>Paralemnalia sp.</i>	Karang Muda Rumput	Look alike species
166	<i>Parazoanthus gracilis</i>	Polip Kuning	Look alike species
167	<i>Parazoanthus spp.</i>		Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
168	<i>Phyllodiscus semoni</i>	Anemon Api	Look alike species
169	<i>Phymanthus sp.</i>	Anemon Halus	Look alike species
170	<i>Polycarpa aurata</i>	Spon Monyet	Look alike species
171	<i>Polycarpa spp.</i>	Spon Tunicate	Look alike species
172	<i>Protopalythoa spp.</i>	Polip Kancing	Look alike species
173	<i>Pseudocorynactis sp</i>	Anemon Matahari	Look alike species
174	<i>Radianthus spp</i>		Look alike species
175	<i>Rhodactis inchoata</i>	Jamur Mata Sapi Merah	Look alike species
176	<i>Rhodactis indosinensis</i>	Jamur Rambut	Look alike species
177	<i>Rhodactis sp.</i>		Look alike species
178	<i>Ricordea spp.</i>	Jamur Ricordea	Look alike species
179	<i>Ricordea yuma</i>	Jamur Jerawat	Look alike species
180	<i>Rumphella aggregata</i>		Look alike species
181	<i>Sansibia spp.</i>	Awut Kecil	Look alike species
182	<i>Sarcophyton ehrenbergi</i>		Look alike species
183	<i>Sarcophyton elegans</i>		Look alike species
184	<i>Sarcophyton sp.</i>	Karang Muda Bulat Warna, Karang Muda Bulat Daging, Karang Muda Bulat Lunak, Karang Muda Bulat Payung	Look alike species
185	<i>Sarcophyton trocheliophorum</i>		Look alike species
186	<i>Scleronephthya spp.</i>	Karang Muda Air Merah	Look alike species
187	<i>Sinularia asterolobata</i>	Karang Muda Campur Besar	Look alike species
188	<i>Sinularia brassica</i>	Karang Muda Campur Kuping Jari Karang Muda Campur Sikat	Look alike species
189	<i>Sinularia dura</i>	Karang Muda Campur Kuping	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
190	<i>Sinularia flexibilis</i>	Karang Muda Campur Kaktus	Look alike species
191	<i>Sinularia mollis</i>	Karang Muda Campur Kaktus	Look alike species
192	<i>Sinularia polydactyla</i>	Karang Muda Campur Kemonceng	Look alike species
193	<i>Sinularia sp.</i>	Karang Muda Campur Campur	Look alike species
194	<i>Stichodactyla helianthus</i>	Anemon Karpas	Look alike species
195	<i>Stichodactyla gigantea</i>	Anemon Karpas	Look alike species
196	<i>Stichodactyla haddoni</i>	Anemon Karpas Pendek Hijau Metalik	Look alike species
197	<i>Stichodactyla martensii</i>	Anemon Karpas Strip	Look alike species
198	<i>Stichodactyla spp</i>	Anemon Karpas	Look alike species
199	<i>Stichodactyla tapetum</i>	Anemon Karpas Mini	Look alike species
200	<i>Stylotella aurantum</i>	Spon Kuning	Look alike species
201	<i>Symphodium spp.</i>		Look alike species
202	<i>Umbellulifera spp.</i>	Karang Muda Seroja Strawberi	Look alike species
203	<i>Various sp.</i>		Look alike species
204	<i>Xenia spp.</i>	Awut Pulsa	Look alike species
205	<i>Xenia umbellata</i>	Awut Pulsa	Look alike species
206	<i>Zoanthus sociatus</i>	Polip Warna	Look alike species
207	<i>Zoanthus sp.</i>	Polip Pasir Warna	Look alike species
208	<i>Actinopyga bannwarthi</i>	Teripang Sepatu	Look alike species
209	<i>Actinopyga caerulea</i>	Teripang Kossong	Look alike species
210	<i>Actinopyga echinites</i>	Kunyit, Ladu-Ladu, Kapok, Bilado, Kassi, Teripang Raja	Look alike species
211	<i>Actinopyga lecanora</i>	Batu, Balibi, Hitam, Teripang Koro Susu	Look alike species
212	<i>Actinopyga mauritiana</i>	Buntal, Ballang Ulu, Teripang Sepatu	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
213	<i>Actinopyga miliaris</i>	Kapok, Lotong, Gamet, Sepatu, Hitam, Teripang Kapuk	Look alike species
214	<i>Apostichopus japonicus</i>	Teripang Kawasa	Look alike species
215	<i>Apostichopus nigripunctatus</i>	Teripang Bola	Look alike species
216	<i>Apostichopus spp.</i>		Look alike species
217	<i>Bohadschia argus</i>	Ular Mata, Gamat Bati, Bintik, Cempedak, Patola, Teripang Gamat	Look alike species
218	<i>Bohadschia marmorata</i>	Teripang Kawasa, Olo-Olok, Getah Putih, Pulut, Benang, Krido Polos	Look alike species
219	<i>Bohadschia ocellata</i>	Teripang Bintik	Look alike species
220	<i>Bohadschia spp.</i>		Look alike species
221	<i>Bohadschia subrubra</i>	Teripang Bintik, Kapok	Look alike species
222	<i>Bohadschia vitiensis</i>	Olok-Olok, Gatta, Gama, Polos, Teripang Kridou	Look alike species
223	<i>Colochirus quadrangularis.</i>		Look alike species
224	<i>Holothuria albiventer</i>	Teripang Kunyit	Look alike species
225	<i>Holothuria arenicola</i>	Teripang Kepala Putih	Look alike species
226	<i>Holothuria atra</i>	Lakling Hitam, Hitam, Dara, Keeling, Cera, Teripang Kapsul	Look alike species
227	<i>Holothuria cinerascens</i>	Zanga Fleur	Look alike species
228	<i>Holothuria coluber</i>	Lakling Hitam, Hitam, Dara, Keeling, Cera, Teripang Kapsul	Look alike species
229	<i>Holothuria conusalba</i>		Look alike species
230	<i>Holothuria edulis</i>	Teripang Dada/ Cera/ Perut/ Lakling Merah, Talking, Batu Keeling	Look alike species
232	<i>Holothuria excellens</i>	Teripang Hitam	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
233	<i>Holothuria flavomaculata</i>	Red Snakefish	Look alike species
234	<i>Holothuria fuscocinerea</i>	Coklat, Lakling Coklat, Teripang Parean	Look alike species
235	<i>Holothuria fuscopunctata</i>	Teripang Susu Putih, Kuning, Kunyit	Look alike species
236	<i>Holothuria hilla</i>	Teripang Batuna	Look alike species
237	<i>Holothuria imitans</i>	Teripang Coklat	Look alike species
238	<i>Holothuria impatiens</i>	Teripang Pulut	Look alike species
239	<i>Holothuria lessoni</i>	Ugai, Gosok, Teripang Ogai	Look alike species
240	<i>Holothuria leucospilota</i>	Getah, Cera, Jepun, Keeling, Talengko, Teripang Cera Merah	Look alike species
241	<i>Holothuria notabilis</i>		Look alike species
242	<i>Holothuria pardalis</i>		Look alike species
243	<i>Holothuria perficax</i>		Look alike species
244	<i>Holothuria rigida</i>	Kebo, Puti, Teripang Pisang	Look alike species
245	<i>Holothuria scabra</i>	Teripang Gosok, Pasir, Buang Kulit, Putih, Kamboa	Look alike species
246	<i>Holothuria turriscelsa</i>	Teripang Hitam	Look alike species
249	<i>Molpadiidae spp.</i>		Look alike species
250	<i>Opheodesoma grisea</i>		Look alike species
251	<i>Paracaudina coriacea</i>		Look alike species
252	<i>Pearsonothuria graeffei</i>	Bintik Merah, Gombyok, Sutra, Cera Duri, Gemuk, Bati, Donga, Teripang Pisang	Look alike species
253	<i>Phyllophorella spiculata</i>	Teripang Bola	Look alike species
254	<i>Phyllophorella spp.</i>		Look alike species
255	<i>Stichopus chloronotus</i>	Teripang Japung	Look alike species
256	<i>Stichopus depressus</i>	Teripang Gosok	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
257	<i>Stichopus fusiformiossa</i>		Look alike species
258	<i>Stichopus herrmanni</i>	Teripang Gamet, Emas, Gamet Kacang, Taikongkong	Look alike species
259	<i>Stichopus horrens</i>	Teripang Kacang Goring, Taikongkong, Kacang, Susu, Rengget	Look alike species
260	<i>Stichopus ludwigi</i>	Teripang Sepatu	Look alike species
261	<i>Stichopus monotuberculatus</i>	Teripang Gamet Pace	Look alike species
262	<i>Stichopus naso</i>	Teripang Bintik, Teripang Gamat	Look alike species
263	<i>Stichopus noctivagus</i>	Gamat, Teripag Talengkong	Look alike species
264	<i>Stichopus ocellatus</i>	Teripang Gamat	Look alike species
265	<i>Stichopus pseudohorrens</i>	Teripang Duri	Look alike species
266	<i>Stichopus quadrifasciatus</i>	Teripang Gamat	Look alike species
267	<i>Stichopus sp.</i>	Teripang Pasir, Teripang Hitam	Look alike species
268	<i>Stichopus spp.</i>	Teripang Gamat	Look alike species
269	<i>Stichopus variegatus</i>	Gamet, Kasur, Taikongkong, Anjing, Kapok, Gama, Teripang Karet Duri	Look alike species
270	<i>Stichopus vastus</i>	TKK, Gamet, Gamet Pace, Kacang Goring, Teripang Coklat	Look alike species
271	<i>Strombus spp.</i>	Siput Gonggong	Look alike species
272	<i>Aetobatus ocellatus</i>	Spotted Eagle Ray, Pari Burung/ Pari Ayam	Look alike species
273	<i>Aetomylaeus maculatus</i>		Look alike species
274	<i>Aetomylaeus nichofii</i>	Banded Eagle Ray, Pari Burung	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
275	<i>Aetomylaeus vespertilio</i>		Look alike species
276	<i>Atelomycterus baliensis</i>	Hiu Tokek, Bali Catshark	Look alike species
277	<i>Atelomycterus marmoratus</i>	Hiu Sonteng, Coral Catshark	Look alike species
278	<i>Ateobatus flagellum</i>	Pari Burung	Look alike species
279	<i>Ateobatus narinari</i>	Pari Burung	Look alike species
280	<i>Bagarius spp.</i>	Ikan Bagarius	Look alike species
281	<i>Bathytoshia lata</i>		Look alike species
282	<i>Bolbometopon muricatum</i>	green humphead parrotfish	Look alike species
283	<i>Brevitrygon heterura</i>	Dwarf Whipray	Look alike species
284	<i>Brevitrygon javaensis</i>	Javan Whipray	Look alike species
285	<i>Callorhincus milii</i>		Look alike species
286	<i>Centrophorus atromarginatus</i>	Hiu Botol	Look alike species
287	<i>Centrophorus granulosus</i>	Gulper Shark, Hiu Botol, Hiu Taji	Look alike species
288	<i>Centrophorus isodon</i>	Blackfin Gulper Shark, Hiu Botol, Hiu Taji	Look alike species
289	<i>Centrophorus lusitanicus</i>	Lowfin Gulper Shark, Hiu Botol, Hiu Taji	Look alike species
290	<i>Centrophorus moluccensis</i>	Hiu Botol Danten	Look alike species
291	<i>Centrophorus niaukang</i>	Taiwan Gulper Shark, Hiu Botol Karang, Hiu Taji	Look alike species
292	<i>Centrophorus squamosus</i>	Hiu Taji	Look alike species
293	<i>Cephaloscyllium pictum</i>	Hiu Lembang	Look alike species
294	<i>Cephaloscyllium speccum</i>	Speckled Swellshark, Hiu Lembang	Look alike species
295	<i>Cephaloscyllium ventriosum</i>	Hiu Botol	Look alike species
296	<i>Chaenogaleus macrostoma</i>		Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
297	<i>Cheilinus trilobatus</i>		Look alike species
298	<i>Chiloscyllium arabicum</i>	Hiu Tokek Arab	Look alike species
299	<i>Chiloscyllium cirratum</i>	Hiu Bambu	Look alike species
300	<i>Chiloscyllium griseum</i>	Hiu Bongol	Look alike species
301	<i>Chiloscyllium hasselti</i>	Hiu Bongo	Look alike species
302	<i>Chiloscyllium indicum</i>	Hiu Tokek Pasir	Look alike species
303	<i>Chiloscyllium plagiosum</i>	Cucut Dolok	Look alike species
304	<i>Chiloscyllium punctatum</i>	Hiu Batu	Look alike species
305	<i>Chitala ornata</i>		Look alike species
306	<i>Chromobotia macracanthus</i>	Ikan Botia	Look alike species
307	<i>Cirrhitigaleus barbifer</i>	Mandarin Dogfish, Hiu Tinggam Hitam, Hiu Taji	Look alike species
308	<i>Dalatias licha</i>	Cucut Botol	Look alike species
309	<i>Dasyatis kuhlii</i>		Look alike species
310	<i>Dasyatis microps</i>	Pari Sapi	Look alike species
311	<i>Dasyatis parvonigra</i>		Look alike species
312	<i>Dasyatis spp</i>		Look alike species
313	<i>Dasyatis ushiei</i>		Look alike species
314	<i>Dasyatis zugei</i>	Pari Toka Toka	Look alike species
315	<i>Datnioides microlepis</i>	Tiger Fish, Datz Sumatera	Look alike species
316	<i>Deania calcea</i>	Hiu Botol Monyong	Look alike species
317	<i>Discodoris sp</i>	Lintah Laut / Lintah Bulan	Look alike species
319	<i>Epalzeorhynchus kalopterus</i>	Ikan Flying Fox	Look alike species
320	<i>Eusphyra blochii</i>	Hiu Martil, Cucut Ronggeng	Look alike species
321	<i>Fluvitrygon kittipongi</i>	Roughback Whipray	Look alike species
322	<i>Galeocerdo cuvier</i>		Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
323	<i>Galeorhinus galeus</i>	School Shark, Tope Shark, Snapper Shark, and Soupfin Shark	Look alike species
324	<i>Ginglymostoma cirratum</i>	Hiu Perawat	Look alike species
325	<i>Glyphis fowlerae</i>	Borneo River Shark, Hiu Bekem Sungai	Look alike species
326	<i>Glyphis glyphis</i>	Speartooth Shark, Hiu Bekem Sungai	Look alike species
327	<i>Gymnura japonica</i>	Pari kelelawar	Look alike species
328	<i>Gymnura poecilura</i>	Pari kelelawar	Look alike species
329	<i>Gymnura zonura</i>	Pari kelelawar	Look alike species
331	<i>Halaelurus buergeri</i>	Indonesian Blackspotted Catshark, Hiu Tokek	Look alike species
332	<i>Halaelurus maculosus</i>	Indonesian Speckled Catshark, Hiu Tokek	Look alike species
333	<i>Hemigaleus australiensis</i>	Hiu Garuda	Look alike species
334	<i>Hemigaleus microstoma</i>	Hiu Kacang	Look alike species
335	<i>Hemipristis elongata</i>	Hiu Monas	Look alike species
336	<i>Hemitriakis indroyonoi</i>	Hiu Meong	Look alike species
337	<i>Hemitrygon akajei</i>	Red Stingray	Look alike species
338	<i>Hemitrygon bennetti</i>	Bennett's Stingray	Look alike species
339	<i>Hemitrygon fluviorum</i>	Pari Sungai	Look alike species
340	<i>Hepttranchias perlo</i>	Hiu Areuy	Look alike species
341	<i>Hexanchus griseus</i>	Hiu Tahu Putih	Look alike species
342	<i>Hexanchus nakamurai</i>	Hiu Minyak	Look alike species
343	<i>Himantura australis</i>	Pari Sungai, Pari Macan	Look alike species
344	<i>Himantura fava</i>	Pari macan	Look alike species
345	<i>Himantura granulata</i>	Pari sapi	Look alike species
346	<i>Himantura kittipongi</i>	Pari Macan	Look alike species
347	<i>Himantura leoparda</i>	Pari Macan, Pari Total	Look alike species
348	<i>Himantura lobistoma</i>	Pari Lumpur	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
349	<i>Himantura pastinacoides</i>	Pari duri	Look alike species
350	<i>Himantura toshi</i>	Pari tutul	Look alike species
351	<i>Himantura uarnak</i>	Pari macan	Look alike species
352	<i>Himantura undulata</i>	Pari macan	Look alike species
353	<i>Holacanthus africanus</i>	Guinean Angel Fish	Look alike species
354	<i>Holacanthus bermudensis</i>	Bermuda Blue Angel Fish	Look alike species
355	<i>Holacanthus ciliaris</i>	Queen Angel Fish	Look alike species
356	<i>Holacanthus limbaughii</i>	Clipperton Angel Fish	Look alike species
358	<i>Holacanthus passer</i>	King Angel Fish	Look alike species
359	<i>Holacanthus tricolor</i>	Rock Beauty Angel Fish	Look alike species
360	<i>Hydrolagus novaezelandiae</i>	Hiu Hantu Gelap	Look alike species
361	<i>Hydrolagus spp</i>		Look alike species
362	<i>Isistius brasiliensis</i>	Cookiecutter Shark	Look alike species
363	<i>Isogomphodon oxyrinchus</i>	Daggernose shark	Look alike species
364	<i>Logo garricki</i>	Longnose Houndshark, Hiu Karang	Look alike species
365	<i>Maculabatis gerrardi</i>	Pari cingir	Look alike species
366	<i>Maculabatis macrura</i>	Pari Ekor Cambuk	Look alike species
367	<i>Maculabatis pastinacoides</i>	Pari aer/Pari Bulat	Look alike species
368	<i>Mastacembelus erythrotaenia</i>	Ikan Tilan	Look alike species
369	<i>Megatrygon microps</i>	pari sapi	Look alike species
370	<i>Mustelus lenticulatus</i>	Rig Shark, Spotted Estuary Smoothound	Look alike species
371	<i>Mustelus manazo</i>	Cucut Londer	Look alike species
372	<i>Mustelus schmitti</i>	Hiu Gatuzo	Look alike species
373	<i>Mustelus widodoi</i>	Hiu Kacang, Cucut Lender	Look alike species
374	<i>Narcine baliensis</i>	Pari Elektrik	Look alike species
375	<i>Nasolamia velox</i>	Whitenose shark	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
376	<i>Nebrius ferrugineus</i>	Hiu Gedok, Hiu Bisu, Hiu Bodok, Hiu Tawny	Look alike species
377	<i>Negaprion acutidens</i>	Hiu Lemon	Look alike species
378	<i>Neolissochilus sumatranus</i>	Ikan batak, Ikan jurung	Look alike species
379	<i>Neotrygon australiae</i>	Pari Kembang	Look alike species
380	<i>Neotrygon caeruleopunctata</i>	Pari Kembang	Look alike species
381	<i>Neotrygon kuhlii</i>	Pari kodok	Look alike species
382	<i>Neotrygon orientalis</i>	Pari Kembang	Look alike species
383	<i>Odontaspis ferox</i>	Hiu Macan Pasir	Look alike species
384	<i>Odontaspis noronhai</i>	Hiu Macan Pasir	Look alike species
385	<i>Orectolobum ornatus</i>	Hiu wobbegong, Hiu Kodok	Look alike species
386	<i>Orectolobus maculatus</i>	Hiu Wobbegong	Look alike species
387	<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>	Arwana Brazil / Arwana Silver	Look alike species
388	<i>Paragaleus randalli</i>	hiu pasir	Look alike species
389	<i>Paragaleus tengi</i>	Hiu Pasir	Look alike species
390	<i>Pastinachus ater</i>	Pari ekor sapi	Look alike species
391	<i>Pastinachus atrus</i>		Look alike species
392	<i>Pastinachus gracilicaudus</i>	Pari Bendera, Pari Sungai	Look alike species
393	<i>Pastinachus sephen</i>	Pari bendera	Look alike species
394	<i>Pastinachus solocirostris</i>	Pari bendera	Look alike species
395	<i>Pastinachus stellurostris</i>	Pari bendera	Look alike species
396	<i>Pateobatis blekeeri</i>	Pari Cingir	Look alike species
397	<i>Pateobatis fai</i>	Pari	Look alike species
398	<i>Pateobatis jenkinsii</i>	Pari duri	Look alike species
399	<i>Pateobatis uarnacoides</i>	Pari mondol	Look alike species
400	<i>Pseudocharchias kamoharai</i>	Hiu Tongar	Look alike species
401	<i>Pteroplatytrygon violecea</i>	<i>Pelagic Stingray</i>	Look alike species

No.	Jenis Ikan	Nama Umum	Status Perlindungan
402	<i>Rhinoptera javanica</i>	Pari elang	Look alike species
403	<i>Rhinoptera jayakari</i>	Pari Burung	Look alike species
404	<i>Rhinoptera bonasus</i>	Pari Hidung sapi	Look alike species
405	<i>Squalus spp.</i>		Look alike species
406	<i>Squatina legnota</i>	Hiu Kodok	Look alike species
407	<i>Stegostoma fasciatum</i>	Zebra Shark, Hiu Tutul	Look alike species
408	<i>Stegostoma tigrinum</i>	Zebra Shark, Hiu Loreng	Look alike species
409	<i>Taeniura lymma</i>	Pari Totol	Look alike species
410	<i>Taeniurops meyeri</i>	Blotched Stingray, Pari Bubur, Pari Ubur-Ubur	Look alike species
411	<i>Telatrygon biasa</i>	Indonesian Sharpnose Ray	Look alike species
412	<i>Telatrygon zugei</i>	Pari hidung runcing	Look alike species
413	<i>Tor douronensis</i>	Ikan gariang, ikan semah, ikan mahseer	Look alike species
414	<i>Tor soro</i>	Ikan gariang, ikan semah, ikan mahseer	Look alike species
415	<i>Tor tambra</i>	Ikan gariang, ikan semah, ikan mahseer	Look alike species
416	<i>Tor tambroides</i>	Ikan gariang, ikan semah, ikan mahseer	Look alike species
417	<i>Urogymnus asperrimus</i>	Pari duren	Look alike species
418	<i>Urogymnus granulatus</i>	Mangrove Whipray	Look alike species
419	<i>Urogymnus lobistoma</i>	Pari pasir	Look alike species
420	<i>Zameus squamulosus</i>	Hiu Beurit	Look alike species

Lampiran 5. Tabel Hasil Kegiatan Aksi Bersih Pantai Laut

No.	Lokasi	Total volume sampah (Kg)
1.	Pantai Kedongan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali	77.078,4
2.	Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (Kawasan Mangrove TAHURA Ngurah Rai Denpasar)	15.726
3.	Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat	287

Lampiran 6. Tabel Hasil Rehabilitasi Mangrove dan Sekolah Pantai Indonesia

No.	Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan PPK	Desa Daudolu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Luas: 6 Ha Penerima Bantuan: Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sejahtera
2	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan PPK	Desa Serubeba, Kecamatan. Rote Timur, Kabupaten Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Luas: 18 Ha Penerima Bantuan: Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sejahtera
3	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan PPK	Pulau Sika, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi NTT	Luas: 2,5 Ha Penerima Bantuan: Kelompok Forum Komunikasi Nelayan Kabola (FKNK)
4	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan PPK	Desa Mutus, Kecamatan Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya	Luas: 3,5 Ha Penerima Bantuan: Kelompok Konservasi Mkun Mnu (KKMM)
5	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan PPK	Desa Ngilngof, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku	Luas: 5 Ha Penerima Bantuan: Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Bo'ok Bal
6	Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan PPK	Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DK Jakarta	Luas: 1 Ha Penerima Bantuan: CV. Cipta Bumi Lestari
7	Sekolah Pantai Indonesia	Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Jumlah Peserta: 100 siswa Penerima Bantuan: SDN 2 Gili Indah, SMPN 1 SATAP, dan SMK Pariwisata Gili Trawangan.
8	Sekolah Pantai Indonesia	Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DK Jakarta	Jumlah peserta: 185 siswa Penerima Bantuan: Kelas 5 dan 6 di SDN 1 Kamal Muara didampingi 11 guru pendamping

Lampiran 7. Tabel produktivitas lahan garam rakyat per Provinsi

Provinsi	Kabupaten /Kota	Produksi (ton)													Produktivitas Per Provinsi (Ton/Ha)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total		
ACEH	ACEH SELATAN	6.67	3.33	5.33	5.33	8.00	6.67	-	9.33	6.67	-	8.00	-	59.33	168.76	ACEH
ACEH	ACEH TIMUR	-	-	2.00	3.57	2.33	3.33	-	2.33	4.17	3.33	2.67	-	23.73		
ACEH	ACEH BESAR	0.40	0.67	0.43	2.89	0.47	3.24	0.53	1.00	4.63	0.60	8.47	-	23.32		
ACEH	PIDIE	44.15	46.10	46.76	45.43	58.51	57.18	61.56	61.01	60.24	40.98	23.38	-	545.29		
ACEH	ACEH UTARA	-	1.62	11.31	15.61	13.73	12.41	2.96	4.04	9.15	5.38	-	-	76.20		
ACEH	BIREUEN	28.16	30.00	28.63	24.13	30.51	31.33	32.86	32.22	32.89	13.94	-	-	284.67	8.07	JAWA BARAT
JAWA BARAT	CIREBON	0.05	0.04	0.03	0.04	0.01	0.04	0.13	0.30	3.77	4.69	0.05	0.05	9.21		
JAWA BARAT	INDRAMAYU	-	-	-	-	-	-	0.95	0.97	2.49	8.04	-	-	12.46		
JAWA BARAT	KARAWANG	-	-	-	-	-	-	0.10	0.16	0.91	1.35	-	-	2.53		
JAWA TENGAH	REMBANG	-	-	-	-	-	-	0.21	5.21	9.59	10.67	-	-	25.68	19.27	JAWA TENGAH
JAWA TENGAH	PATI	-	-	-	-	-	0.02	4.82	9.91	10.55	9.87	0.67	-	35.84		
JAWA TENGAH	JEPARA	-	-	-	-	-	-	2.89	4.79	7.64	5.75	-	-	21.07		
JAWA TENGAH	DEMAK	-	-	-	-	-	0.05	0.92	1.97	3.62	4.66	0.23	-	11.46		
JAWA TENGAH	BREBES	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.88	1.33	0.02	-	2.29		
JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	-	-	-	-	0.07	0.02	2.96	6.11	5.33	3.41	-	-	17.91	34.89	JAWA TIMUR
JAWA TIMUR	PASURUAN	-	-	-	-	-	0.00	0.10	3.00	9.58	9.81	1.30	-	23.79		
JAWA TIMUR	SIDOARJO	-	-	-	-	-	-	-	16.47	46.19	24.45	-	-	87.11		
JAWA TIMUR	TUBAN	-	-	-	-	-	-	-	0.06	4.93	10.28	-	-	15.28		
JAWA TIMUR	LAMONGAN	0.26	0.52	0.59	0.52	0.55	0.62	0.80	0.59	6.83	7.68	0.59	0.59	20.13		
JAWA TIMUR	GRESIK	-	-	-	-	-	0.50	0.75	5.48	5.63	2.58	0.04	-	14.98		
JAWA TIMUR	BANGKALAN	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.85	4.90	10.38	10.31	0.45	0.04	26.99		
JAWA TIMUR	SAMPANG	-	-	-	-	-	-	-	2.07	3.72	2.50	-	-	8.29		
JAWA TIMUR	PAMEKASAN	-	-	-	-	-	1.65	7.53	15.11	21.45	16.94	1.59	-	64.27		
JAWA TIMUR	SUMENEP	-	-	-	-	-	-	1.73	7.69	17.12	5.83	-	-	32.36		
JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	-	-	-	-	-	-	0.61	8.16	9.98	23.43	0.41	-	42.58		
JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	-	-	-	-	-	-	0.04	8.29	32.71	23.97	-	-	65.01		

Provinsi	Kabupaten /Kota	Produksi (ton)													Produktivitas Per Provinsi (Ton/Ha)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total		
BALI	KLUNGKUNG	-	-	-	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3.33	18.48	BALI
BALI	BULELENG	-	-	-	-	-	-	2.55	11.27	12.71	7.11	-	-	33.64		
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.04	18.67	NTB
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	1.78	2.20	2.15	-	-	6.13		
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	-	-	-	-	-	-	0.39	2.01	1.55	3.69	2.37	0.06	10.06		
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	-	-	-	-	-	-	-	6.88	8.55	6.33	-	-	21.76		
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	-	-	-	-	-	-	1.02	14.70	21.94	16.97	5.58	-	60.21		
NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	-	-	-	-	-	-	-	0.59	4.98	7.50	0.74	-	13.80		
NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	-	-	-	-	-	-	1.67	5.00	5.53	5.23	-	-	17.44	87.95	NTT
NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	-	-	-	-	-	-	16.80	25.34	29.85	33.84	36.65	30.18	172.65		
NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	-	-	-	-	-	-	0.49	1.28	1.51	0.93	0.86	0.67	5.74		
NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.07	-	-	2.07		
NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	33.20	33.45	33.00	34.90	33.95	37.10	42.55	10.40	23.85	-	-	-	282.40		
NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	2.31	-	-	2.96		
NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	-	-	0.54	1.69	2.25	4.22	6.35	19.34	27.18	44.70	22.30	11.06	139.63		
NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	-	-	-	-	-	6.42	12.80	20.52	20.96	19.99	-	0.00	80.68		
SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	6.36	1.66	0.05	0.05	0.08	0.78	6.74	3.53	0.83	2.91	6.20	6.17	35.38	35.38	SULTENG
SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	-	-	-	-	-	-	-	0.64	5.81	7.92	0.35	-	14.72	15.23	SULSEL

LKJ TAHUN 2025

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan



Provinsi	Kabupaten /Kota	Produksi (ton)													Produktivitas Per Provinsi (Ton/Ha)	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Total		
SULAWESI SELATAN	TAKALAR	-	-	-	-	-	-	0.05	8.47	13.88	14.28	-	-	36.68		
SULAWESI SELATAN	MAROS	-	-	-	-	-	-	-	1.01	1.68	0.82	-	-	3.51		
SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	-	-	-	-	-	-	0.02	1.14	2.89	1.94	-	-	5.99		
GORONTALO	POHUWATO	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.07	0.16	0.15	0.73	0.37	-	1.74	1.74	GORONTALO
PRODUKTIVITAS GARAM TAMBAK TAHUN 2025		2.49	2.45	2.68	2.87	3.14	3.45	4.47	7.19	10.79	9.02	2.57	1.02	52.13		



Lampiran 8. Tabel Kualitas Garam K1 Tahun 2025

Kode Kabupaten /Kota	Provinsi	Kab/Kota	Produksi KP1 (Kg)	Produksi KP2 (Kg)	Produksi KP3 (Kg)	Total_Produksi (Kg)	KP1 (%)
1101	ACEH	ACEH SELATAN	26,700.00	-	-	26,700.00	100.00 %
1103	ACEH	ACEH TIMUR	-	-	4,746.67	4,746.67	0.00%
1106	ACEH	ACEH BESAR	3,498.00	-	-	3,498.00	100.00 %
1107	ACEH	PIDIE	242,543.74	-	-	242,543.74	100.00 %
1108	ACEH	ACEH UTARA	51,864.83	-	-	51,864.83	100.00 %
1111	ACEH	BIREUEN	79,080.40	-	-	79,080.40	100.00 %
3209	JAWA BARAT	CIREBON	2,088,036.29	9,760,420.56	159,885.80	12,008,342.64	17.39%
3212	JAWA BARAT	INDRAMAYU	24,516,416.32	10,867,293.56	-	35,383,709.87	69.29%
3215	JAWA BARAT	KARAWANG	15,056.31	479,284.91	14,899.00	509,240.22	2.96%
3317	JAWA TENGAH	REMBANG	23,288,813.54	18,823,490.51	-	42,112,304.05	55.30%
3318	JAWA TENGAH	PATI	48,356,584.14	163,187,641.27	-	211,544,225.42	22.86%
3320	JAWA TENGAH	JEPARA	14,163,432.08	10,926.74	-	14,174,358.82	99.92%
3321	JAWA TENGAH	DEMAK	2,307,664.53	11,507,023.78	53,966.67	13,868,654.98	16.64%
3329	JAWA TENGAH	BREBES	899,103.90	209,807.45	185,442.72	1,294,354.07	69.46%
3513	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	2,808,527.56	417,173.97	-	3,225,701.53	87.07%
3514	JAWA TIMUR	PASURUAN	5,929,533.15	-	-	5,929,533.15	100.00 %
3515	JAWA TIMUR	SIDOARJO	13,493,556.05	-	-	13,493,556.05	100.00 %
3523	JAWA TIMUR	TUBAN	3,427,249.48	-	-	3,427,249.48	100.00 %
3524	JAWA TIMUR	LAMONGAN	2,657,809.27	1,712,480.46	-	4,370,289.73	60.82%

Kode Kabupaten /Kota	Provinsi	Kab/Kota	Produksi KP1 (Kg)	Produksi KP2 (Kg)	Produksi KP3 (Kg)	Total Produksi (Kg)	KP1 (%)
3525	JAWA TIMUR	GRESIK	1,698,174.42	-	-	1,698,174.42	100.00 %
3526	JAWA TIMUR	BANGKALAN	4,708,133.80	10,582.93	-	4,718,716.73	99.78%
3527	JAWA TIMUR	SAMPANG	33,818,807.16	2,689,042.29	-	36,507,849.45	92.63%
3528	JAWA TIMUR	PAMEKASAN	128,069,693.08	-	-	128,069,693.08	100.00 %
3529	JAWA TIMUR	SUMENEP	137,173,108.33	22,047,566.37	-	159,220,674.70	86.15%
3575	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	4,087,942.50	454,842.50	-	4,542,785.00	89.99%
3578	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	43,841,529.89	-	-	43,841,529.89	100.00 %
5105	BALI	KLUNGKUNG	193.33	-	-	193.33	100.00 %
5108	BALI	BULELENG	-	2,974,119.73	-	2,974,119.73	0.00%
5201	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT	1,600.00	-	-	1,600.00	100.00 %
5202	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH	82,600.00	-	-	82,600.00	100.00 %
5203	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	481,559.66	264,176.74	-	745,736.41	64.58%
5204	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	213,741.85	1,583,138.76	202,873.62	1,999,754.23	10.69%
5206	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	-	39,997,091.40	-	39,997,091.40	0.00%
5272	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	1,090.91	13,681.82	26,631.82	41,404.55	2.63%
5301	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	292,037.09	710,888.36	-	1,002,925.45	29.12%
5303	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	1,384,690.21	-	-	1,384,690.21	100.00 %
5310	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	30,941.49	-	32,819.90	63,761.39	48.53%
5311	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	10,350.00	-	-	10,350.00	100.00 %
5313	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	11,860.80	-	-	11,860.80	100.00 %

Kode Kabupaten /Kota	Provinsi	Kab/Kota	Produksi KP1 (Kg)	Produksi KP2 (Kg)	Produksi KP3 (Kg)	Total Produksi (Kg)	KP1 (%)
5314	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	6,811.54	-	-	6,811.54	100.00 %
5316	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	-	11,785,096.71	-	11,785,096.71	0.00%
5320	NUSA TENGGARA TIMUR	SABU RAIJUA	4,437,129.23	-	-	4,437,129.23	100.00 %
7271	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	59,336.11	199,071.96	104,492.13	362,900.21	16.35%
7304	SULAWESI SELATAN	JENEPONTO	934,253.03	7,952,911.71	-	8,887,164.74	10.51%
7305	SULAWESI SELATAN	TAKALAR	-	5,300,558.78	-	5,300,558.78	0.00%
7309	SULAWESI SELATAN	MAROS	39,628.46	-	-	39,628.46	100.00 %
7310	SULAWESI SELATAN	PANGKAJENE KEPULAUAN	4,650,818.42	-	-	4,650,818.42	100.00 %
7504	GORONTALO	POHUWATO	188,850.00	-	-	188,850.00	100.00 %
PRODUKSI GARAM TAMBAK BERDASARKAN KP1-KP3			510,580,350.89	312,958,313.28	785,758.32	824,324,422.49	61.07%



Lampiran 9. Tabel Nilai Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan

No.	Nama Kegiatan	Nama Perusahaan	Jumlah Investasi (Rp)	Sumber Data
1.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Bhimasena Power Indonesia	16,535,338,323	OSS
2.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Dinar Darum	359,015,660	OSS
3.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Ainul Hayat Sejahtera	1,790,759,903,500	OSS
4.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Sari Dumai Sejati	246,688,473,771	OSS
5.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Merak Energi Indonesia	3,886,410	OSS
6.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Kuta Refinery Nusantara	9,329,703,250	OSS
7.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	PLN Nusantara Power (Paiton 1-2)	13,026,588,667,273	OSS
8.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	PLN Nusantara Power (Paiton 9)	649,014,730,224	OSS
9.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	PLN Nusantara Power (Gresik)	714,925,847,861	OSS
10.	Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)	Chandra Asri Pasific	220,000,000,000	OSS
11.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	PT Muara Wisesa Samudra	3,818,536,862,339	Dokumen Studi Kelayakan
12.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	PT Manado Utara Perkasa	1,192,294,691,980	Dokumen Studi Kelayakan
13.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	PT Kapuknaga Indah	3,751,901,406,724	Dokumen Studi Kelayakan
14.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	EMP Gebang Limited	45,751,887,057	Dokumen Studi

				Kelayakan
15.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	PT Vesinter Indonesia	176,018,800,000	Dokumen Studi Kelayakan
16.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	PT Limas Raya Griya	83,647,315,027	Dokumen Studi Kelayakan
17.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	PT Uma Graha Berkah	181,855,021,651	Dokumen Studi Kelayakan
18.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	PT Pembangunan Jaya Ancol	1,491,321,939,477	Dokumen Studi Kelayakan
19.	Izin Wisata Bahari	PT Nabucco Maratua Resor	16,500	OSS
20.	Izin Wisata Bahari	PT Maratua Paradise	11,660	OSS
Total			Rp18.822.471.162.783	